

Yakin Helmi-Muslihan Menang Telak

Petani Curhat ke Helmi

BENGKULU- Petani kopi di pedesaan, pasrah. Jeritan mereka selama ini tak didengar, sehingga jalan rusak di desa mereka membuat harga kopi makin anjlok.

Ini terekam dari perjalanan kampanye calon Gubernur Bengkulu nomor 1, Helmi Hasan, saat masuk ke pedalaman Kabupaten Bengkulu Tengah, belum lama ini. Saat melintas di jalan, Helmi Hasan sempat berhenti melihat kopi yang sedang dijemur warga. Salah seorang petani kopi lalu menghampiri, yang ternyata pemilik kopi tersebut.

► Baca **YAKIN...Hal 7**



PEMIMPIN YANG PEDULI: Cagub nomor urut 1, Helmi Hasan melihat kopi yang dijemur petani. Helmi juga menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah para petani.

DUKUNGAN PENUH: Para tokoh adat mendukung Rohidin-Rosjonsyah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2021-2004 mendatang.



Bulat Mufakat, Tokoh Adat dan Masyarakat Bengkulu Ingin Rohidin Kembali jadi Gubernur

BENGKULU - Ingin Rohidin kembali jadi Gubernur Bengkulu periode 2021-2024, tokoh adat dan masyarakat Sukaraja Bengkulu sampaikan dukungan langsung kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin - Rosjonsyah.

Dukungan disampaikan oleh Ketua Adat Sukaraja H. Ahmad Junaidi (70) kepada Rohidin Mersyah di posko pemenangan Jalan Batanghari Kota Bengkulu, 16/11.

► Baca **BULAT...Hal 7**

DKPP Hadirkan Menkumham



PERSIDANGAN : Ketua dan keempat anggota KPU Provinsi Bengkulu menghadiri sidang perdana yang digelar oleh DKPP, kemarin.

BENGKULU - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu di ruang sidang Bawaslu Provinsi Bengkulu, kemarin. Dr. Alfitra Salamm, APU selaku ketua majelis menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan sidang kedua, pasalnya dalam sidang kemarin, dirasa belum cukup informasi untuk menetapkan keputusan.

"Harus menghadirkan saksi lainnya, seperti ka Lapas Sukamiskin. Tadi juga permintaan dari KPU RI harus menghadirkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Juga kami akan mengundang kepolisian, kejaksaan, dan Pokja. Kita akan minta penjelasan, dan ini akan menjadi bahan kami dari DKPP untuk memutuskan perkara ini," kata Alfitra.

► Baca **DKPP...Hal 7**

Cab. Bandung

Refill Parfume



NADIEM MAKARIM

2 Juta Tenaga Pendidik Non PNS Dapat BSU

JAKARTA - Bak kejatuhan durian runtuh, kemarin (16/11), guru honorer dihujani kabar gembira dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Guru honorer bakal kebagian jatah bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah. Selain itu, ada titik terang mengenai status kepegawaian mereka.

► Baca **2 JUTA...Hal 7**

POLING CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU PILIHAN PEMBACA RB

3.521

ROHIDIN-ROSJONSYAH

1200

HELMI-MUSLIHAN

351

AGUSRIN-IMRON

Agung Toyota

INDULGE IN THE THRILL IN CHARGE OF BETTER FUTURE

COROLLA CROSS

GASOLINE

HUBUNGI: **AGUNG TOYOTA**

BENGKULU : Jl.P. Natadiri No.163 Telp. 0736 - 21127

HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23035

BOOKING SERVIS : 08537776873

Agusrin-Imron Punya Ikatan Emosional Tinggi dengan Minangkabau

BENGKULU - Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 3 Agusrin M Najamudin dan calon Wakil Gubernur HM Imron Rosyadi MM ternyata memiliki ikatan emosional yang sangat tinggi dengan keluarga besar Minangkabau. Ketua Komunitas Minang for Agusrin, Syaifonizar mengatakan,

ikatan emosional itu tergambar dari lokasi pemakaman leluhur Pagaryung yang berada di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah. Agusrin sendiri merupakan keturunan dari sana.

► Baca **AGUSRIN...Hal 7**



AGUSRIN M NAJAMUDIN

IMRON ROSYADI

Patuhi Protokol Kesehatan #DENGAN

SELALU GUNAKAN MASKER

HUT KE - 52 PROVINSI BENGKULU

BENGKULU ESPORTS TOURNAMENT 2020

"Generasi Kreatif dan Sportif, Masa Depan Provinsi Bengkulu"

PUBG MOBILE MOBILE LEGENDS Football PES2021 FREE FIRE

TOTAL HADIAH RP. 100.000.000

TERBUKA UNTUK REGIONAL SUMBAGSEL!

MAIN EVENT 21 - 25 NOVEMBER 2020

CONTACT INFO 0822 1092 2884 (Brados)

supported by rakyatbengkulu.com VBASIA.NEWS



PEMAPARAN : Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU bersama narasumber lain Drs Yuharuddin, Dr Elfahmi Lubis, M.Si dan Pemred RB Riky Dwi Putra dihadirkan dalam Ngetren Media, tadi malam.

Covid-19 Meningkatkan, Partisipasi Bisa Menurun

Media Ikut Cegah Politik Uang

BENGKULU - Pelaksanaan Pilkada dalam pandemi Covid-19 ini menjadi dilema, pasalnya menjadi sebuah paradoks. Ini disampaikan oleh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU dalam Ngetren media : ngobrol etika penyelenggara Pemilu dengan Media, kemarin malam (16/11). Menurut Alfitra, paradoks ini dimana demokrasi itu nilainya adalah kumpul-kumpul, arak arakan, yang bertentangan dengan Covid-19. Ini demokrasi terlarang, sementara ada batasan yang harus dipatuhi, agar pencegahan penyebaran Covid-19. Juga ini mendorong suburnya money

politic, karena uangnya tidak digunakan untuk yang lain lain. Sehingga, kami berharap untuk press itu mengawal, jangan sampai money politic menjadi kemenangan pilkada ini," sampai Alfitra, kemarin. Jadi Pilkada dalam pandemi ini, lanjutnya, akan mengurangi nilai nilai demokrasi. Bahkan bisa menurunkan partisipasi pemilih pada 9 Desember mendatang. "Kalau mendekati 9 Desember nanti Covid-19 meningkat, maka partisipasi pemilih bisa menurun," kata Alfitra. Ditambahkan, Tim Pemeriksa Daerah DKPP yang juga akademisi muda, Dr. Elfahmi Lubis, M. Pd, salah satu narasumber Ngetren media. Ia menyampaikan dalam konteks Pilkada serentak, media memiliki pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Bersama

juga dengan penyelenggaraan dan Bawaslu. Yang mana media sebagai kontrol untuk pelaksanaan Pilkada ini. Jika kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu tidak sesuai dengan undang-undang. Disinilah fungsi media, diperlukan dimana untuk menjaga integritas dari Pilkada ini. "Masyarakat itu sekarang antara yakin atau tidak, nah disini fungsi media untuk menyebarkan informasi yang benar. Dan menekan hoax terkait Pilkada dalam pandemi ini," sampai Elfahmi Lubis. Untuk itu, media harus dirangkul oleh DKPP sebagai partner untuk mengawasi segala pelanggaran yang berpotensi terjadi saat masa pandemi ini. Narasumber lain yang dihadirkan yakni Drs. Yuharuddin, M.Si dan Pemred RB Riky Dwi Putra. (war)

Libur Nataru Bisa Diperpendek Atau Ditiadakan

JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya masih akan melihat perkembangan kasus hingga seminggu kedepan untuk mengetahui dampak penuh dari libur panjang Maulid Nabi beberapa minggu lalu. "Apakah memang memicu kenaikan kasus, atau memang masyarakat sudah semakin baik dalam menerapkan liburan aman tanpa kerumunan," papar Doni Minggu (15/11). Doni menjelaskan, jika dibandingkan libur panjang pada akhir Agustus lalu, angka pasien pada pasca libur Oktober masih dalam batas-batas yang terkendali. Baik di RSD Wisma Atlet Kemayoran maupun di Rumah-Rumah Sakit di DKI Jakarta. Doni mengatakan, jika diketahui bahwa kasus tidak mengalami peningkatan dan masih bisa dikendalikan dengan baik, maka Insyaallah pada akhir tahun mendatang (periode Nataru) pihaknya tetap memberi masukan pada pemerintah untuk bisa melanjutkan libur panjang. "Tapi apabila kasusnya mening-

kat seperti pada periode Agustus-September yang lalu, tentu rekomendasinya adalah libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali," kata Doni. Dikonfirmasi terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy justru mengatakan sebaliknya. Menurutnya, belum ada rencana untuk mengurangi bahkan menghilangkan libur panjang Nataru sebagai upaya pengurangan risiko kenaikan kasus baru. "Belum ada opsi itu," ujarnya kemarin (16/11). Artinya, skema libur akhir tahun masih akan mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, dan 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Berdasarkan SKB 3 Menteri yang ditandatangani pada 20 Mei 2020 oleh Menag Fachrul Razi, Menaker Ida Fauziyah, dan Menpan RB Tjahjo Kumolo tersebut, ditetapkan bahwa libur nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Natal jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020. Tanggal merah ini dileng-

kapi dengan cuti bersama Natal di tanggal 24 Desember 2020. Libur dua hari ini kemudian ditambah dengan cuti bersama bersama-sama tanggal 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020 sebagai pengganti Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pengalihan cuti bersama ini dilakukan dengan prediksi kasus telah menurun, sehingga masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan waktu libur untuk bersilaturahmi setelah menahan diri di rumah beberapa bulan. Sayangnya, Muhadjir tidak merinci terobosan baru apa yang bakal dilakukan pemerintah untuk meminimalisir risiko penambahan kasus baru yang selalu mengikuti libur panjang. Terlebih untuk libur nataru yang selalu jadi puncak liburan dalam satu tahun. Yang jelas, dia mengatakan, bahwa pemerintah selalu mengevaluasi situasi pandemi. Bahkan, evaluasi ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Setiap Senin, Presiden memimpin langsung evaluasi akhir pekan," ungkapnya. Untuk libur panjang pada akhir Oktober lalu, diakuinya, dari evaluasi yang dilakukan ada kenaikan kasus di beberapa daerah. Tetapi hingga saat ini, keadaan diklaim lebih baik jika dibandingkan dengan libur-libur panjang sebelumnya. Dengan kata lain, masyarakat sudah lebih aware mengenai berwisata aman di tengah pandemi. (jgg)

Bulat Mufakat, Tokoh Adat dan...

Sambungan dari halaman 1
"Inilah bentuk perwakilan dari Kecamatan Sukaraja, yang menurut kami boleh dikatakan pak Rohidin pasti menang," sampai Junaidi yang sudah tidak muda lagi dengan penuh semangat dan optimisme paslon nomor 2 pada Pilgub 2020 pasti menang. Menurut Junaidi, dukungan tidak serta merta diberikan. Karena menurutnya, panggilan hati nurani untuk Bengkulu Sejahtera dan Hebat harus dinahkodai oleh pemimpin yang bersih dan punya

integritas tinggi. "Kami hanya ingin pembangunan dilanjutkan dan Bengkulu maju. Ini hanya bisa dilakukan oleh pak Rohidin. Sudah membuktikan selama kepemimpinannya," terangnya. Walaupun hanya perwakilan, dikatakan Junaidi bahwa masyarakat adat ibarat 'satu pohon' dan memiliki cabang dan ranting cukup banyak di belakang. "Jadi kami menyatakan keseriusan, bukan mendukung lagi, tetapi untuk dudukkan pasangan Romer - Jon ini menjadi Gubernur kembali di Bengkulu," tegasnya.

Kedatangan rombongan dari pinggiran kota Bengkulu ini cukup bervariasi. Ada dari keluarga Serawai, dan Jawa Jawa. "Yakinlah Serawai dan Jawa ini sudah menyatu, yakin dan percaya pencalonan Gubernur ini akan mendapat suara mufakat bulat untuk kakanda kami Rohidin," pungkasnya. Masyarakat adat dan tokoh masyarakat Bengkulu ini berkomitmen untuk memberikan kemenangan di atas 50% dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU. (**)

Agusrin-Imron Punya Ikatan...

Sambungan dari halaman 1
"Anak cucu dari Rindu Hati saat ini tengah berjuang merebut pucuk pimpinan daerah ini, kami bangga dan akan mendukung sekuat tenaga," tegas Joni saat dihubungi, Senin (16/11). Komunitas Minang Bengkulu for Agusrin sendiri beranggotakan para perantau asal wilayah Tanah

Datar Sumatra Barat yang tersebar se Provinsi Bengkulu. Sementara itu, calon wakil gubernur Imron Rosyadi bergelar Sutan Pamuncak Alam yang dianugerahkan warga Minang saat dirinya menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara selama dua periode. Dukungan warga Minang bahkan juga disampaikan dalam pertemuan tatap muka warga Minang di Kabu-

paten Kepahiang beberapa waktu lalu. Menurut Imron, warga minang menitipkan pesan perdamaian dan minta diperhatikan jika dirinya bersama Agusrin menang Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. "Terima kasih atas dukungan seluruh warga minang kepada kami, ini catatan penting dan menjadi prioritas kami setelah dilantik nanti," tegas Imron. (**)

DKPP Hadirkan Menkumham

Sambungan dari halaman 1

Dijelaskannya, sidang yang dapat disaksikan secara streaming itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap KPU RI dan juga KPU Provinsi. Serta mendengarkan saksi. Namun, pihak majelis berkesimpulan bahwa harus menghadirkan saksi lainnya, berkenaan dengan beberapa hal yang harus diklarifikasi. Misalnya surat surat terkait remisi dari pengadu, Agusrin M Najamuddin. "Kami juga harus menjelaskan dari beberapa surat yang harus diklarifikasi, berkaitan dengan surat Bapas, surat remisi, ini kan harus jelas. Maka untuk itu kami juga harus membuka sidang kedua. Kami harus meminta keterangan tambahan saja," kata Alfitra. Sementara itu, berkenaan dengan pelaksanaan sidang kedua nanti ditentukan DKPP. Dan berkenaan dengan tempat pelaksanaan sidang, ia pun belum dapat memastikan apakah nanti di Jakarta atau kembali ke Bengkulu itu sedang dipertimbangkan oleh DKPP. Mengingat hasil dari keputusan itu, akan menentukan nasib dari para teradu tersebut. "DKPP itu hanya berpengaruh terhadap etik penyelenggara pe-

milu saja. Jadi keputusan kita hanya mengikat pada ke penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu," tukasnya. Disisi lain, selaku teradu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra menyampaikan pihaknya telah menyampaikan penjelasan terkait objek yang diadukan. Juga telah menghadirkan saksi, salah satunya dari tim Pokja pencalonan dari Poldda Bengkulu. Ini disampaikan untuk menjelaskan perihal hasil verifikasi berkas Paslon, terutama yang berkenaan dengan remisi si pengadu, Agusrin M Najamuddin. "Untuk remisi, KPU mempedomani surat yang kita terima pada saat klarifikasi, dan kedua adalah pada surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI, itu menjelaskan bahwa remisinya itu 4 bulan. Itu yang kita pedomani surat resmi dari Kemenkumham," ucap Irwan. Dijelaskannya, surat itu menjelaskan keterangan dari remisi. Pasalnya, setiap remisi yang diberikan itu didasari oleh keputusan Kemenkumham. Selain itu, ia memastikan selama proses pencalonan yang dilakukan, pihaknya itu tidak menerima surat, selain dokumen dokumen yang memang secara resmi yang diterima. Baik

yang disampaikan calon pada masa pencalonan, maupun pada saat perbaikan. "Itu saja yang kita pedomani, kalau ada yang diluar itu, kita tidak. Juga Kita memverifikasi surat yang disampaikan ya, pada saat itu memang belum secara detail persoalan status terpidananya. Kemudian dari surat tersebut kita melakukan klarifikasi dan baru kita dapatkan secara detail," jelas Irwan. Terpisah, saksi fakta pengadu sekaligus Ketua Forum Silaturahmi Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil Maharana) Indonesia Drs. Jumanto, SH mengatakan apa yang telah dilakukan oleh KPU sebelumnya, yakni menetapkan Agusrin - Imron Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah melanggar kode etik. Menurutnya kewenangan KPU adalah untuk memverifikasi, bukan untuk mengklarifikasi. "Tugas KPU itu kan harusnya memverifikasi, bukan klarifikasi. Yakni mengetahui surat dari Kalapas itu betul atau tidak. Dari hasil verifikasi itulah KPU meminta surat, sesuai dengan fakta ini selanjutnya kita diberi surat untuk memperbaiki berkas, namun justru KPU malah memiliki surat sendiri," tegas Jumanto. (war)

Yakin Helmi-Muslihan Menang Telak

Sambungan dari halaman 1

"Harga kopi sekarang parah pak. Turun dari Rp 25 ribu jadi Rp 16 ribu per kilo, kadang Rp 15 ribu per kilo," keluh petani tadi. Helmi tampak serius menanyakan penyebab anjloknya harga kopi. Petani yang masih muda itu mengatakan, sudah lama harga kopi turun. "Ya salah satunya kalau di tempat kami harga turun karena jalan rusak pak. Pembeli hasil kopi kewalahan mengangkut kopi dari desa kami, karena jalan buruk. Saya yakin dengan program 20 kunci bahagia pak Helmi-Muslihan, bapak akan menang telak," jelas petani kopi. Ia berharap, pemerintah kedepan harus memperhatikan akses jalan petani. Karena selama ini pemerintah terlalu banyak bicara soal peningkatan kopi Provinsi Bengkulu, tapi tak ada realisasi. Salah satunya, acuh soal jalan perkebunan maupun pertanian. "Ini (jalan rusak) tak boleh dilanjutkan. Mereka (petani) butuh akses yang lancar untuk mengangkut hasil tani. Insya Allah bersama Helmi-Muslihan, jalan provinsi 100 persen mulus," kata Helmi. "Untuk harga kopi yang anjlok, nanti kita giatkan lewat BUMD untuk membeli hasil petani. Sehingga harganya bisa stabil dan tidak merugikan para petani," tukas Helmi. Sementara itu, di tempat terpisah, bersama Calon Gubernur Helmi Hasan, Calon Wakil Gubernur Bengkulu Nomor Urut 2 Muslihan Diding Soetrisno menegaskan komitmennya menjadikan APBD Provinsi Bengkulu seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.

"Bersama Helmi-Muslihan APBD untuk rakyat, bukan untuk pejabat, apalagi penjahat," tegasnya saat menyapa warga masyarakat Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Minggu, 15 November 2020. Bengkulu Bahagia dan APBD untuk Rakyat menjadi nafas perjuangan Pak Jenggot dan Pak Kumis yang dikemas dalam 20 Kunci Bahagia Ala Helmi-Muslihan. 20 Kunci itu merupakan program kebahagiaan yang sebagian besarnya sudah dikerjakan Helmi saat masih aktif menjabat Wali Kota Bengkulu. Bagi mereka yang tidak menginginkan APBD untuk Rakyat, lanjut Muslihan, 20 Kunci Bahagia itu disebut sebagai sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal, dan ditanyakan uangnya dari mana. "Tapi bapak ibu sudah merasakan kepemimpinan Bapak Helmi Hasan. Jalan di Kota Bengkulu mulus, ambulans ada di setiap kelurahan dan gratis, rumah sakit megah dengan pelayanannya wah, rasmie saat pandemi dibagikan tanpa kecuali, tanpa melihat apa sukunya atau apa agamanya, bedah rumah, Gerakan Peduli Yatim, program 1001 janda, program memakmurkan rumah ibadah, dan program-program lainnya sudah sebagian besar diwujudkan," bebarnya. Pembuktian kinerja Helmi adalah jawaban atas sesuatu yang dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Muslihan pun menegaskan, semua program pemerintah yang pro rakyat berjalan atau tidaknya itu tergantung nawaitu dari pemim-

pinnya, mau atau tidak. "Dengan 20 Kunci Bahagia, nasib para janda pun mendapatkan perhatian pemerintah. Janda yang mengurus anaknya tanpa suami, jika pemerintah tidak hadir, kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mereka akan dibantu modal sesuai dengan keahliannya, agar mereka punya penghasilan," kata Muslihan. 20 Kunci Bahagia juga memberikan perhatian khusus bagi keluarga pasien RSUD M Yunus Bengkulu, khususnya yang dari desa. Supaya tidak ada lagi keluarga pasien yang harus tidur di lantai atau halaman rumah sakit. "Helmi-Muslihan gubernur wakil gubernur, kami bangun satu tempat penginapan gratis untuk keluarga pasien M Yunus, jadi nanti ada rumah singgah biar enggak lagi tidur di lantai. Begitu-lah harusnya APBD direalisasikan, untuk rakyat," ujar Muslihan. Oleh sebab itu, purnawarawan TNI ini mengajak warga masyarakat untuk memilih menggunakan hati nurani. Ikut menyukseskan Pilgub Bengkulu 9 Desember 2020 mendatang dengan mencoblos Helmi-Muslihan Nomor Urut 1. "Saya mengharapkan keridaan bapak ibu sekalian tanggal 9 Desember nanti. Bapak ibu, paslon nomor satu itu berbeda dengan paslon lainnya, kalau paslon nomor satu, yang satu berbaju putih pakai janggut, yang satu lagi berbaju batik pakai kumis, kalau yang lain enggak berjanggut enggak berkumis. Jadi ingat bapak ibu coblosnya yang pakai janggut atau yang pakai kumis," demikian Muslihan. (**)

2 Juta Tenaga Pendidik Non PNS...

Sambungan dari halaman 1

Dalam rapat kerja bersama Komisi X, kemarin, Nadiem menyampaikan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan BSU bagi para pendidik dan tenaga kependidikan honorer atau non pegawai negeri sipil (PNS). Targetnya, lebih dari 2 juta orang bakal mendapat bantuan dengan total anggaran Rp 3,6 Triliun tersebut. "Yang paling besar adalah guru honorer , sebesar 1,6 juta orang. Sisanya dosen dan tenaga kependidikan," tuturnya. Tenaga kependidikan ini dimaksudkan pada guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidikan kesetaraan, tenaga pustakawan, tenaga laboratorium, hingga tenaga administrasi. Jumlah yang bakal diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan honorer (non-PNS) tersebut mencapai Rp 1,8 juta. Bantuan diberikan satu kali pada November 2020 ini. Dia menegaskan, bantuan ini tidak hanya diberikan pada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau perguruan tinggi negeri saja. Namun juga, para pendidik dan tenaga kependidikan di swasta. Menurutnya, mereka sangat layak mendapat bantuan ini karena merupakan ujung tombak system pendidikan. Selain itu, mereka juga rentan terdampak di masa krisis ekonomi seperti saat ini. "Mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat," ungkapnya. Kendati demikian, ada prasyarat yang wajib dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan honorer untuk menerima BSU ini. Pertama, calon penerima merupakan warga Negara Indonesia (WNI). Kedua, tidak menerima bantuan subsidi dari Kementerian Ketenagakerjaan

(Kemenaker). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker. Ketiga, berstatus bukan PNS, tidak mengikuti program kartu prakerja. Terakhir, berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Menurutnya, prasyarat tersebut telah dibuat sederhana mungkin. Seperti yang telah dilakukan pada penyaluran bantuan subsidi kuota bagi pelajar dan pendidik sebelumnya. "Kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan. Sehingga eksekusi bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana," papar mantan Bos Go-Jek tersebut. Selain BSU, Nadiem juga menyinggung soal kesempatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dia mengatakan, bahwa tahun depan, seluruh guru honorer di Indonesia bisa mengikuti tes seleksi PPPK. Upaya ini dilakukan sebagai apresiasi pada para guru honorer yang telah berjasa bagi pendidikan di Indonesia dengan harapan mereka bisa mendapat kesejahteraan yang layak. "Tahun 2021, kami akan melakukan seleksi massal dengan infrastruktur TIK kita, yang juga digunakan untuk asesmen kompetensi," jelasnya. Lebih lanjut dia memaparkan, bahwa nantinya guru honorer tidak hanya dijamin bisa mengikuti seleksi tapi juga diberi kesempatan lebih. Maksudnya, ketika gagal dalam seleksi pertama, mereka akan mendapat kesempatan sampai dengan tiga kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, untuk menunjang ujian, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) juga akan mempersiapkan materi pembelajaran mandiri secara

online bagi teman-teman guru. Sehingga, mereka bisa menguasai dan kemungkinan untuk lulus tes akan meningkat. "Itu gratis diberikan oleh GTK dan itu pembelajaran online secara mandiri jadi ada panduan ada bantuan," papar lulusan Harvard University tersebut. Nadiem mengatakan, bagi guru honorer yang lulus tes maka otomatis akan diangkat menjadi guru PPPK. Di mana, gaji akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Gaji ini akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya untuk masing-masing pengadaaan tes. "Jadi pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai 1 juta guru. Tapi harus lulus seleksi," katanya. Karenanya, pemerintah daerah diminta untuk segera mengajukan formasi pendiknnya. Tak perlu khawatir mengenai anggaran yang diperlukan. Dari catatan Kemendikbud sendiri, baru 200 ribu formasi yang disampaikan. Padahal, diperkirakan kebutuhan tenaga pendidik lebih besar dari itu. Diakuinya, kebijakan ini mungkin tidak akan 100 persen bisa diselesaikan dalam satu tahun. Tapi paling tidak, sudah ada awal mula untuk menjawab keresahan guru honorer selama ini. Tentunya, dengan melalui tes guna memastikan kelayakan guru honorer. sehingga, pendidikan anak-anak terlindungi dengan suatu standar minimum. Dikonfirmasi terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo membenarkan tentang rencana tes seleksi PPPK untuk guru honorer tahun depan. "Saat ini kementerian, lembaga, dan pemda sedang menginventarisasi kebutuhannya," ujarnya singkat. (jgg)

Hasil Operasi Musang Nala 20 (1 sampai 15 November 2020)

No	Kecamatan	Jumlah TO	TO	Non TCSK	TSK	BB
1	Polda Bengkulu	5	1	1	2	2, (2 unit Hp)
2	Polres Bengkulu	3	3	4	8	10, (5 unit sepeda Motor, Kotak HP dan nota Beli Hp)
3	Polres Bengkulu Utara	2	2	2	3	42, (5 unit Sepeda motor, 4 unit Hp, 1 unit BPKB dan 1 STNK, R2, 1 kunci motor, 1 kotak amal, 1 Cologan, 2 granok, 26 bungkus Rokok, 1 tas kecil uang tunai Rp 2 juta, 7, (1 unit R2, 1 unit TV, 4 unit Hp, 1 jam tangan)
4	Polres BS	2	2	4	5	4, (1 unit Mobil R4 bernama stak dan kontak) 1 unit R2
5	Polres Seluma	2	1	1	1	7, (1 unit R2, 5 unit Hp, 1 aki)
6	Polres Kaur	2	2	2	4	5, (1 unit Hp, 1 BPKB R2, 1 kausan, 1 unit jam dinding, 1 unit klapang, jati)
7	Polres Kepahiang	2	2	2	3	12, (3 unit Bodi samping R2 Beat, 1 unit bank depan motor beat, 1 unit bodi depan motor beat, 1 kunci T, 2 unit motor beat, 2 unit hp, 1 STNK dan BPKB R2
8	Polres RL	2	2	4	3	3, (2 unit sepeda Motor), Uang tunai
9	Polres Mukomoko	2	2	1	3	4, (3 unit sepeda Motor), 1 HP
10	Polres Lebong	2	2	2	5	6, (1 unit TV, 1 unit Receiver, 1 lembar faktur penjualan, 1 unit lemari, 1 unit springbed, 1 R4
11	Polres Benteng	2	2	1	3	
Jumlah		26	21	24	49	102

Amankan 40 Tersangka

Hasil Operasi Musang Nala



SUDARNO

BENGKULU - Operasi Musang Nala yang dimulai 1 sampai 15 November 2020 digelar Polda Bengkulu dan Polres jajaran, berhasil mengamankan 40 orang tersangka dalam berbagai kasus pidana. Juga didapati 102 unit barang bukti berbagai jenis. (Lengkap lihat grafis).

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Sudarno, S.Sos, MH menjelaskan dari 40 tersangka yang ditangkap itu, sebanyak 21 orang diantaranya merupakan target operasi (TO). "Dari para tersangka itu turut diamankan 102 barang bukti berbagai jenis. Ada sepeda motor, mobil dan lainnya," ungkapnya.

Dijelaskannya Ops Musang Nala merupakan kegiatan bertujuan menciptakan situasi yang tetap kondusif di Provinsi Bengkulu jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Harapannya, dari Ops Musang Nalah ini situasi Kamtibmas betul-betul aman dan tertib yang selama ini sudah terjaga dengan baik. Sehingga pelaksanaan pilkada berlangsung dengan aman, damai dan lancar. "Kita harapkan situasi dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang berlangsung damai," sampai Sudarno. (wij)



LAPOR: Tertipu Beli Handphone harga Murah dari pelaku yang ngaku sebagai oknum polisi. Korban lapor Ke SPKT Polda Bengkulu

Ngaku Polisi Tipu Ibu Rumah Tangga Modus Jual Hp Murah

BENGKULU - Jadi pengalaman berharga buat kita semua agar tidak mudah percaya dengan orang yang kenal dari media sosial. Sekalipun mengaku polisi. Sebagaimana dialami Magareta (30) ibu rumah tangga, warga Jalan Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa. Dia menjadi korban penipuan saat membeli handphone (Hp) Oppo keluaran terbaru dengan harga Rp 800 ribu melalui facebook.

Akun penjual atas nama Gio Vani, mengaku sebagai anggota Polisi Dinas di Polres Bengkulu Utara yang memiliki usaha counter Hp. Pria yang diduga kuat polisi gadungan itu, dalam memikat korban menyebutkan kalau ia menjual Hp baru dengan harga jauh di bawah harga normal, sebagai kado di Hari Ulang Tahun counternya yang ke 10 tahun.

Kejadian ini pada Sabtu (14/11) siang. MG melihat postingan pelaku langsung berminat membeli 1 Hp Oppo. Dia mentransfer uang sebesar Rp 800 ribu ke rekening yang diposting pelaku. Setelah uang ditransfer, Hp yang ditunggu-tunggu tak kunjung dikirim pelaku. Selain itu pertemanannya dengan Gio Vani diblokir dan nomor WA pelaku sudah tak aktif. Dari sinilah korban merasa telah ditipu, kemarin (16/11) mendatangi Polda Bengkulu melaporkan pelaku penipuan tersebut. Dari Polda korban diarahkan melapor ke Polres Bengkulu.

Ditemui RB di Mapolda Bengkulu, awalnya ia cukup percaya dengan postingan pelaku di facebook. Apalagi pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang memiliki counter Hp. "Saya percaya karena dia (pelaku) mengatakan promo hari ulang tahun counter ke 10 maka menjual harga yang murah. Saya tidak bisa lagi melihat postingannya karena saya telah menghapus pertemanannya," ungkap Magareta. (wij)



HASIL TANGKAPAN: BBN Kota Bengkulu berhasil meringkus 1 tersangka penanam ganja, RS (tengah) bersama barang bukti 15 pohon ganja.

Petani Terciduk Menanam Ganja

Barang Bukti 15 Pohon dan 0,5 Kg Ganja Kering

BENGKULU - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu berhasil membekuk seorang petani, RS alias Rohman (30) warga Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. RS kedapatan menanam ganja. Malah sudah ada yang dipanen, hasil menanam ganja selama satu tahun.

Diperkuat barang bukti yang ditemukan BNN Kota, yakni 15 pohon ganja umur 3 bulan serta 0,5 Kg ganja kering. RS menanam ganja di kebunnya yang berlokasi di Bukit Jenggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Rohman dibekuk tim BNN Kota Bengkulu Jumat (13/11) sekitar pukul 08.00 WIB di Terminal Regional Air Sebakul Kota Bengkulu ketika tersangka mengendarai motor bersama istrinya hendak pulang ke Kaur.

Kepala BNN Kota Bengkulu AKBP Alexander, S. Soeki. MH mengatakan

kepada awak media saat konferensi pers bahwa Rohman dibekuk tidak luput dari informasi masyarakat. Tim BNN Kota Bengkulu tidak menyanyikan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian. Tidak membutuhkan waktu lama tim mendapati seseorang yang dicurigai sebagaimana informasi diterima, melintas di Terminal Air Sebakul mengunkan sepeda motor Honda Blade. Kemudian langsung bekuk. "RS alias Rohman rencananya ingin pulang ke desanya di Kabupaten Kaur dari kebunnya bersama istri. Saat kita bekuk dan kita lakukan pengeledahan ditemukan dua paket ganja besar di seberat 500 gram (0,5 kg)," jelas Alex begitu Alexander, S. Soeki biasa disapa.

Masih penjelasan Alex, dalam membawa dua paket ganja itu, Rohman menyimpannya secara terpisah. Satu paket ganja disimpan di dalam tas dibungkus dengan bajunya dan satu paket disimpan di dalam karung disatukan dengan

sayur-sayuran. "Dari informasi yang kita dapat kalau Rohman ini sering mengedarkan ganja di wilayah Kota Bengkulu. Rohman sudah kita pantau selama tiga bulan terakhir ini," jelasnya.

Selanjutnya Rohman bersama istrinya yang sedang hamil muda, yakni dua bulan tersebut langsung diamankan ke Kantor BNN Kota Bengkulu. Namun hanya Rohman yang diproses lebih lanjut, sedangkan istrinya dilepas karena tak terindikasi terlibat. Malahan istrinya sempat shock, menangis ketika mengetahui sang suami membawa ganja.

"Kalau pengakuan Rohman ganja tersebut hasil tanaman sendiri di kebun kopinya. Akan dibawa ke Kabupaten Kaur untuk di jual. Dari keterangan ini kita lakukan pengecekan ke kebun tersangka. Ditemukan 15 pohon ganja. Karena jarak tempuh yang jauh, harus berjalan kaki ke lokasi dengan medan yang cukup berat, maka hanya sebagian pohon ganja kita bawa sebagai barang bukti.

Lainnya kita musnahkan di lokasi," terang Alex.

Tidak menutup kemungkinan masih ada petani lainnya yang juga menanam ganja. Maka BNN Kota akan berkoordinasi dengan Polda Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan tindak lanjut dari temunya tersebut. "Karena itu wilayahnya Benteng, maka kita akan koordiansi dengan Polda dan Pemkab Benteng untuk menindak lanjut," ujarnya.

Sementara itu Rohman saat ditanya RB usai konferensi pers membenarkan kalau ganja tersebut hasil dari tanamannya sendiri selama satu tahun terakhir. "Rencananya ganja itu akan saya bawa ke dusun untuk dijual. Baru kali ini hasil panen ganja mau saya jual. Selama ini hanya dipakai sendiri," katanya.

Adapun alasan ia menanam ganja, awalnya dari saran rekannya bahwa kalau di dekat pohon kopi juga diselingi tanaman ganja, maka pertumbuhan kopi akan bagus. "Saran kawan seperti itu," dalihnya. (wij)

Keterangan Saksi Kurang, BP Sekwan Dikembalikan



SAMPAIKAN: Kasubdit Tipikor Bengkulu Kompiler Imam Wijayanto Menyampaikan Berkas P19 dikembalikan oleh pihak Kejaksaan untuk perbaikan berkas

Dugaan Korupsi Anggaran BBM dan Perawatan Randis

BENGKULU - Setelah dilakukan penelitian oleh Jaksas Kejati Bengkulu, berkas perkara (BP) dugaan korupsi Anggaran pembelian BBM dan perawatan randis tahun 2017 atas tersangka Sekwan Seluma, Eddy Soepriadi dinyatakan belum lengkap. Jaksas mengembalikan BP ke penyidik Sunbdi Tipikor Polda Bengkulu disertai petunjuk (P19).

Salah satu alasan BP dinyatakan belum lengkap karena masih ada keterangan saksi terkait yang dibutuhkan. Penyidik diminta memenuhi kekurangan keterangan tersebut. "Ya pemenuhan petunjuk jaksas. Berkas yang kami serahkan kepada jaksas ada sedikit kekurangan, harus dilengkapi kembali. Salah satunya terkait keterangan saksi," sampai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Direktur Reskrim-sus Polda Bengkulu Kombes.

Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. Stmk melalui Kasubdit tipikor Kompiler Imam Wijayanto, S.Ik kepada awak media.

Siapa saksi yang akan kembali diminta keterangan dan keterangan apa yang dibutuhkan guna kelengkapan berkas perkara? Imam Wijayanto tak bersedia mengemukakan lebih jauh. "Itu teknisnya penyidik. Pastinya ada beberapa keterangan yang harus diperbaiki. Terkait saksilah," ujarnya.

Imam Wijayanto optimis berkas perkara akan langsung dinyatakan lengkap oleh jaksas setelah dilakukan perbaikan. "Mudah-mudahan dalam minggu ini berkas akan kita serahkan kembali setelah petunjuk jaksas dipenuhi," pungkasnya.

Dalam perkara ini Eddy Soepriadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dia merupakan tersangka ketiga setelah dua tersangka pertama divonis bersalah oleh PN Tipikor Bengkulu dan saat ini masih menjalani di pidana

penjara di Lapas Benteng. Masing-masing Fery Lastoni selaku PPTK dan Syamsul Asri selaku bendahara.

Dalam perkara ini kedua pejabat di Setwan Seluma ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satunya perbuatan membuat kwitansi palsu dan SPJ fiktif untuk menutupi pengeluaran anggaran BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017. Agar jumlah anggaran dikeluarkan sama dengan anggaran yang diterima baik itu pembelian BBM maupun pemeliharaan mobil dinas.

Akibat perbuatan tersebut baik Fery Lastoni maupun Syamsul Asri dijatuhi pidana masing-masing 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara. Dalam pengembangan penyidikan, Polda Bengkulu kembali melakukan penetapan tersangka, yakni Sekwa Seluma Dedy Soepriadi pada 4 September 2020. (wij)



MELAPOR: Sugiarto, SH, MH bersama rekannya usai menyampaikan aduan masyarakat ke Penyidik Dit Reskrim-sus Polda Bengkulu, kemarin (16/11).

Adukan Stafsus Kemeterian BUMN

Dugaan Fitnah Terhadap Pospera

BENGKULU - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Bengkulu melalui Penasihat Hukum, Sugiarto, SH, MH medatangi Polda Bengkulu, kemarin (16/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Sugiarto bersama rekannya, menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) atas pernyataan salah satu Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Banda Usaha Milik Negara (BUMN) di salah satu grup WahtsApp. Pernyataan itu dirasakan sebagai bentuk fitnah terhadap Pospera.

Sugiarto ditemui RB di gedung Dit Reskrim Polda Bengkulu mengatakan, pada Kamis (5/11) Stafsus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Whatsapp Group membantah Pospera, ada link berita yang isinya menuliskan PTTimah Merugi. Kemudian Arya Sinulingga mengomentari link berita tersebut dengan kalimat "Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama lima tahun pada rugi semua.... bikin pusing memang".

"Pernyataan Arya Sinulingga ini menurut kami cukup tendensius (bersifat berpihak) yang mengand-

ung unsur kebencian, adu domba dan fitnah tanpa dasar yang bisa dibenarkan," ujar Sugiarto selaku PH Pospera Bengkulu.

Masih menurut Sugiarto, Pospera tidak memiliki Komisaris di PTTimah. Dengan demikian pernyataan Arya Sinulingga yang mengkaitkan kerugian PT Timah dengan keberadaan komisaris dari Pospera adalah sesuatu yang tidak benar. Menurutnya ini nyata berbentuk fitnah. Sedangkan Perusahaan Umum (Perum) Damri yang keberadaannya Komisaris dari Pospera, selama ini diketahui sebagai perusahaan yang bertugas melayani banyak trayek perintis pada kenyataannya sejak tahun 2015 hingga 2019 sudah mendapatkan Laba (keuntungan).

"Sebelumnya kita secara nasional melalui PH Pospera pusat sudah melakukan konferensi pers untuk meminta saudara Arya menarik pernyataan dan meminta maaf dalam kurun waktu tiga hari. Ternyata Arya tidak mengindahkan apa yang di minta oleh PH Pospera pusat, maka hari ini DPD Pospera se-Indonesia melaporkan Arya ke Polda masing-masing. Kita harap laporan kita ini ditindaklanjuti," pungkasnya. (wij)

POLING CABUP DAN CAWABUP SELUMA PILIHAN PEMBACA RB

2
306
EDISON-KHAIRI

3
20
ERWIN-GUSTIANTO

1
17
SUPARTO-NOVIANAN

Bawaslu Tegur Admin Grup Medsos

SELUMA - Bawaslu Seluma menegur admin grup media sosial Facebook "Menuju Pilbup Seluma 2020" untuk menertibkan anggota grup tersebut. Tindakan ini dilakukan Bawaslu untuk menciptakan Pilkada Seluma yang aman dan kondusif.

Dimana postingan simpatisan salah satu pendukung pasangan calon (paslon) menjadi sorotan berbagai pihak setelah beredarnya postingan berbau SARA yang mendeskripsikan salah satu paslon.

Kordiv Hukum dan P3S Bawaslu Seluma, Suryadi mengatakan ketika pihaknya mendapatkan informasi tersebut, Bawaslu langsung melakukan pengecekan dengan melihat postingan yang dimaksud. Setelah itu Bawaslu bertindak dengan menegur admin grup untuk menertibkan isi postingan yang dinilai sudah melanggar ketentuan. "Kita minta admin grup medsos tersebut bisa menertibkan postingan-postingan yang kurang pantas," ujarnya.

Menurutnya, postingan yang berbau SARA dapat memicu gangguan stabilitas keamanan di Kabupaten Seluma selama tahapan pilkada. Suryadi mengimbau masyarakat yang memiliki akun media sosial untuk bijak dalam menggunakannya. Selain mengawasi potensi pelanggaran dalam pilkada di dunia nyata, Bawaslu juga melakukan pengawasan di dunia maya. Tujuannya agar pesta demokrasi di Kabupaten Seluma bisa berjalan kondusif dan berintegritas tanpa adanya hoax, SARA maupun ujaran kebencian atau black campaign.

"Kita mengajak untuk bijak dalam bermedsos, jangan cederai pesta demokrasi ini. Kita ingin agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman dan damai," tegasnya. (cup)

Sukseskan Gelaran Pilkada

SELUMA - Memasuki masa kampanye Pilkada Seluma, Kapolres Seluma melakukan kunjungan langsung ke posko tim pemenang masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Seluma, Senin (16/11) siang. Kunjungan ini untuk mengimbau agar ketiga pasangan calon, tim dan pendukungnya dapat menciptakan rasa aman dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada.

Tak lupa Kapolres juga menekankan agar selama tahapan pilkada ini tetap mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19. Kapolres Seluma, AKBP Swittanto Prasetyo S.IK dalam kunjungan itu meminta agar paslon dan tim pemenangan dalam melaksanakan kampanye tetap menaati protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker, tidak mengumpulkan banyak massa dan menjaga jarak. Mengingat di masa pandemi Covid-19 ini, setiap kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kapolres juga mengingatkan soal jumlah massa yang hadir saat kegiatan kampanye, serta tahapan-tahapan lainnya. Yakni harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam PKPU serta Maklumat Kapolri.

"Kita minta agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Terpenting itu tidak ada pengumpulan jumlah massa yang banyak. Juga harus memakai masker," imbau Kapolres.

Kapolres juga berpesan agar semua pihak bisa bersama-sama menjaga situasi kamtibmas dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Seluma. Dimana pasangan calon dan tim pemenangan diminta menjaga emosinya dalam mencari dukungan. Tak lupa, Kapolres juga menekankan agar tidak ada unsur SARA dan politik uang. "Berpolitiklah dengan baik, mari bersama kita menjaga situasi kamtibmas agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan aman, lancar dan damai," harapnya. (cup)

Gaji Bidan PTT Belum Juga Cair

SELUMA - Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Seluma masih bekerja sukarela. Pasalnya, mereka sama sekali belum menerima gaji atau honor sepeserpun dari Pemkab Seluma sejak Januari 2020. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma sampai saat ini juga belum menerima usulan pencairan gaji bidan PTT.

Padahal di APBD Perubahan 2020 telah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk pembayaran honor atau gaji

194 bidan PTT. Sekretaris BPKD Seluma, Suprpto M.Si mengakui pihaknya belum menerima usulan pencairan gaji bidan PTT dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma.

Dijelaskannya, BPKD akan memprosesnya jika dinas terkait telah mengajukan berkas usulan pencairan. Apabila nanti sudah diusulkan dan berkas sudah dinyatakan lengkap, BPKD akan langsung memprosesnya. Ia memastikan proses pencairan paling lambat selama tiga hari dari awal

pengajuan.

"Saat ini bagaimana kita mau proses, belum ada usulan. Sampai hari ini belum ada SPM dari OPD bersangkutan," ujar Suprpto.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin S.Sos mengatakan pihaknya tengah memproses pencairan gaji bidan PTT tersebut. Para bidan PTT juga sudah mulai membuka kembali rekeningnya. Dimana proses pembayaran gaji akan dibayarkan langsung melalui rekening masing-

masing bidan PTT. Dari total anggaran Rp 2 miliar tersebut, pembayaran gaji akan dirapel mulai bulan Januari sampai November. Besaran gajinya sendiri per bulan yaitu sebesar Rp 800 ribu.

"Sudah kita ajukan, masih proses, kita juga telah menerima informasi para bidan sudah mulai membuka rekening masing-masing," ujar Rudi.

Sementara itu, Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca menyatakan ang-

garan gaji bidan PTT sudah dianggarkan di APBDP sebesar Rp 2 miliar. Dengan telah dianggarkannya gaji tersebut, maka seharusnya tidak ada alasan lagi Dinkes Seluma untuk tidak segera mencairkan dan membayarkan gaji bidan PTT. "Pembayaran hak seperti gaji harus diutamakan. Tinggal apa lagi, APBDP sudah disahkan, silakan cairkan. Kasian mereka sudah lama belum juga gajian. Kita minta agar cepat diproses," tegasnya. (cup)



BERKAS: Peserta CPNS yang dinyatakan lulus seleksi melakukan pemberkasan di kantor BKPSDM Seluma.

165 CPNS Sudah Input Data

SELUMA - Sebelum ditetapkan menjadi CPNS, peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS formasi tahun 2019, harus melakukan proses pemberkasan secara online. Berkas diunggah dalam bentuk file scan melalui website scsn.bkn.go.id.

Hingga kemarin (16/11), sebanyak 165 peserta yang dinyatakan lulus CPNS telah melakukan kelangka-

pan berkas dan registrasi di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seluma. Kabid Pengembangan dan Diklat BKPSDM Seluma, Nurlin ST MM membenarkan hal tersebut. Semua peserta yang dinyatakan lulus itu telah melakukan registrasi dan melakukan input data.

Peserta yang sudah dinyatakan lulus wajib

melakukan pembekasan tersebut. Pemberkasan ini untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Pemberkasan sudah harus selesai bulan ini sebelum ditetapkan tanggal mulai tugas (TMT) CPNS pada bulan Desember nanti. "165 peserta semuanya sudah registrasi dan input data di website bkn," ujar Nurlin.

Selanjutnya, BKN akan

melaksanakan proses penetapan NIP CPNS 2019 secara elektronik. Peserta yang telah selesai melakukan input data tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya. Sebagai informasi, berdasarkan jadwal yang tertera dalam Surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V/116-4/99, setelah pemberkasan usai, jadwal yang tersisa adalah pengusulan NIP dan TMT CPNS.

"Untuk peserta kita harapkan segera melakukan input data jangan sampai ketinggalan. Untuk yang sudah input silakan menunggu pemberitahuan selanjutnya," kata Nurlin.

Setelah mendapatkan NIP, para peserta akan diangkat menjadi CPNS. Sedangkan untuk diangkat 100 persen menjadi PNS, maka CPNS harus menunggu setidaknya selama satu tahun. (cup)



BELUM SELESAI: Lokasi pekerjaan pembangunan jalan di Desa Padang Genting yang menggunakan dana desa.

Tunggu Audit dan Hitung Volume Pekerjaan DD

SELUMA - Penanganan kasus dugaan korupsi pada program Dana Desa (DD) di Desa Padang Genting, Kecamatan Seluma Selatan masih terus diproses penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma. Penyidik telah berkoordinasi ke Inspektorat Seluma untuk audit pengerjaan program DD tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan berkoordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seluma. "Kasusnya masih dalam penanganan kita. Masih menunggu audit," kata Kajari Seluma, Muhammad Ali Akbar SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmadi, SH.

Dijelaskannya, untuk koordinasi yang akan dilakukan ke Dinas PUPR Seluma, karena dinas tersebut selaku tim ahli. Sehingga Kejari akan meminta Dinas PUPR melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan dalam pelaksanaan program DD yang telah dilakukan oleh pihak desa.

Ahmadi juga mengatakan setelah audit Inspektorat keluar dan diterima penyidik, Kejari Seluma akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kasus tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi DD Padang Genting tahun anggaran 2017 ini, sudah beberapa saksi yang dipanggil untuk diminta keterangan. Dalam kasus tersebut ada beberapa program pekerjaan fisik yang terindikasi penyelewengan. Dugaan korupsi itu terjadi pada item kegiatan pembangunan jalan Desa Padang Genting tahun 2017. Pekerjaan dengan dana sebesar Rp 448.949.000 sampai saat ini terkesan mandek, dan belum ada kejelasan. Barang bukti yang telah disita jaksa yakni beberapa dokumen kegiatan desa tersebut tahun 2017. (cup)

SH. TRUSS

RANGKA ATAP
BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGANTIAN KAYU

SH. TRUSS bebas perawatan
SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZING
SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kiri Balu No. 87 Kebun Tebang Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870

KUPWA

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprpto No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA

Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
Distributor Resmi Pelumas Pertamina
Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOUR ENGINE

PERTAMINA PELUMAS

SINAR HARAPAN ROOF
GENTENG METAL ZINCALUME®

Ready STOK

2 susun..?
6 susun..?
20 susun..?

Tidak Masalah...!!!

Menyediakan Truss / Rangka Baja Ringan

* Kualitas Terbaik Dan Terjangkau
* Ringan Dan Mudah Mengikuti Bentur Atap
* Anti Gempa Dan Angin Kencang
* Jarak Reng Bisa di Atur Sesuai Dengan Keinginan Anda
Sehingga Anda Dapat Menghemat Reng

Hubungi: **SINAR HARAPAN**
Jl. Kiri Balu No. 87 Kebun Tebang - Bengkulu
Phone (0736) - 21653, Hp. 0822 7838 6870

Usul Tambah Kuota Gas Subsidi

KOTA MANNA - Menyikapi sering terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 Kg subsidi di Bengkulu Selatan (BS) selama tahun 2020 ini, Pemkab BS menggelar rapat, kemarin (16/11). Untuk mencari solusi supaya gas melon itu tidak lagi langka tahun 2021 mendatang.

Permasalahan kelangkaan pasokan gas subsidi ini sering kali terjadi, bahkan terkesan ada permainan oknum. Dalam pertemuan

tersebut, Pemkab BS akan mengupayakan tambahan kuota untuk gas elpiji subsidi untuk BS tahun depan.

Dikatakan Sekda BS Yudi Satria, SE, MM penambahan kuota elpiji 3 Kg untuk BS pada tahun 2021 mendatang sangat penting. Sebab jelas Yudi, kelangkaan elpiji sangat sering terjadi. Selain itu tambahannya tertib administrasi penting terlebih bagi pihak agen atau distributor dan perlunya pengawasan

secara formal agar kelangkaan tidak terjadi lagi dan tidak dimanfaatkan oleh oknum guna meraup keuntungan sendiri.

Sedangkan untuk jumlah kuota yang akan ditambah Sekda meminta pihak terkait untuk dapat benar-benar pas dalam penghitungan. Sehingga tidak terjadi lagi kekurangan gas di masyarakat BS.

"2021 diupayakan ada tambah kuota gas subsidi

untuk BS, agar tidak terjadi lagi kelangkaan dan perlu diadakan pengawasan bersama dilapangan terkait mekanimse penyaluran," terang Yudi.

Diakui Yudi, memang untuk saat ini kondisi pendistribusian gas subsidi sudah normal dan kelangkaan tidak terjadi lagi. Kendati demikian sambung Yudi pengawasan pendistribusian dan peruntukannya tetap harus dipantau. (tek)



BAHAS: Pemkab BS membahas penambahan kuota gas elpiji 3 Kg untuk tahun 2021.

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN

PILIHAN PEMBACA RB

HARTAWAN-DARMIN
1
51

GUSNAN MULYADI-RIFAI TAJUDDIN
3
17

BUDIMAN ISMAUN- HELMI PAMAN
2
11

DEWI SARTIKA-MARWAN ISWANDI
4
7



SOSIALISASI: Dinkes BS melakukan sosialisasi pelayanan terpadu penyakit tidak menular Senin (16/11).

Dinkes Giatkan Padu Cegah PTM

KOTA MANNA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu Selatan (BS) melakukan sosialisasi pelayanan terpadu (Padu) Penyakit Tidak Menular (PTM). Sosialisasi ini bertempat di aula Dinkes BS dengan menyasar 14 Puskesmas dan 14 pengelola program PTM di masing-masing Puskesmas, kemarin (16/11).

Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi pelayanan terpadu ini diharapkan pihak

Puskesmas selaku fasilitas kesehatan tingkat pertama siap melayani penyakit tidak menular di masyarakat. Sesuai Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Diharapkan utusan Puskesmas mampu memahami berbagai jenis PTM dan faktor risikonya, giat melakukan upaya promotif dan preventif PTM dan melakukan deteksi dini faktor risiko PTM.

Berbagai penyakit tidak menular yang banyak di derita masyarakat diantaranya, penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus (DM), penyakit paru kronik, penyakit kanker dan lain sebagainya.

"Sosialisasi ini penting dilakukan agar para petugas di Puskesmas sebagai pelayanan tingkat pertama bisa memberikan pelayanan terpadu secara baik, serta giat melakukan upaya pencegahan

dini," ujar Kepala Dinkes BS, Siswanto, S.Sos, M.Si.

Ditambahkan Siswanto, penyakit tidak menular adalah penyakit yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (Kronis). Umumnya para penderita PTM dilatarbelakangi pola dan gaya hidup yang tidak sehat. Karena itu, melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan di tengah masyarakat khususnya melalui pro-

gram Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Diharapkan bisa menekan laju perkembangan PTM.

"Pencegahan lebih baik dari pada mengobati, maka mulai dari sekarang deteksi dini penyakit tidak menular dengan rutin mengkonsumsi buah dan sayur, berolahraga dan selalu rutin cek kesehatan, terutama bisa dilakukan di Puskesmas dengan pelayanan terpadu PTM yang sudah ada," pungkasnya. (tek)



SAMBUTAN: Penyampaian kata sambutan oleh Ketua KPU Bengkulu Selatan Alpin Samsen, S.Pt.

PANDU: Debat dipandu langsung oleh moderator GM RBTV Pihan Pino

Debat Terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati BS Sukses

Debat terbuka antar Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan (BS) yang diselenggarakan KPU BS dan RBTV kemarin (16/11) berjalan sukses. Ketua KPU BS Alpin Samsen, S.Pt menyampaikan debat diselenggarakan sebagai referensi masyarakat BS untuk menentukan pilihan Pilkada serentak 09 Desember mendatang. (tek/prw)



POSE: Foto bersama Komisioner KPU dan Bawaslu BS dan seluruh Paslon bupati dan wakil bupati.



SANTAI: Tampak peserta debat, KPU, Bawaslu dan seluruh undangan terlihat santai.

AMANKAN: Debat berjalan aman berkat pengamanan yang dilakukan personel Polres BS, Kodim 0406 Bengkulu Selatan Kaur (BSK) dan Satpol PP BS.

POLING CABUP DAN CAWABUP KAU PILIHAN PEMBACA



LINTAS

7 Sampan dan 2 Perahu Karet Diterjankan

KOTA BINTUHAN - Pada hari kedua pencarian dua pemuda Desa Wayhawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada hari kedua belum juga membuahkan hasil. Gelombang tinggi yang terjadi saat ini menyulitkan tim gabungan menemukan korban. Kedua korban yang belum ditemukan adalah Lengki (20) dan Imam (17) kedua hilang sejak Minggu dini hari (15/11) sekitar pukul 04.00 WIB dan sampai Senin malam belum juga ditemukan.

Tim SAR yang berasal dari TNI, Polri, BPBD Kaur, Basarnas dan juga gabungan dari nelayan dan warga sekitar mencari keberadaan korban di tengah laut saja. Namun juga terus menyalisir pantai sekitar Desa Way Hawang dan sekitarnya untuk mencari keberadaan korban. Tidak hanya itu saja tujuh sampan dan dua perahu karet terus bergantian mencari korban di tengah laut kemarin.

Dengan gelombang yang tinggi saat ini pencarian pun belum juga membuahkan hasil, tidak hanya itu saja Kapolres Kaur juga menambah personel untuk pencarian korban dengan menyalisir pantai hingga Senin malam. Bahkan dalam kesempatan itu Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH meminta semua tim sar untuk tetap berkoordinasi dengan nelayan sekitar dalam pencarian korban. Hal ini dilakukan karena nelayan sekitar lah yang memahami kondisi pasang surutnya air laut di sekitar TKP.

"Untuk pencarian akan terus kita lanjutkan sesuai SOP yaitu tujuh hari kedepan hingga tanggal 21 November 2020. Kita berharap korban bisa ditemukan, melihat kondisi gelombang maka pencarian akan lebih kita fokuskan menyusuri bibir pantai saja. Namun tetap dengan peralatan yang lengkap dan sesuai SOP. Kita minta tim sar tidak gegabah dalam mencari korban dan selalu berkoordinasi dengan nelayan sekitar," terang Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono kemarin.

Melihat kondisi cuaca dan gelombang tinggi, hingga kemarin tim SAR belum melakukan penyelaman di mana lokasi korban tenggelam atau terseret arus saat mancing ikan. Namun baru akan dilakukan jika kondisi, gelombang sudah normal nantinya. Saat ini tim SAR juga telah membangun posko untuk pencarian korban hilang di pantai Wayhawang hingga beberapa hari kedepan. Tidak hanya itu pihak Polres Kaur juga meminta nelayan lainnya di wilayah Kaur juga terus memantau keberadaan korban yang diduga terseret arus gelombang tinggi.

"Kita sudah menyalisir hingga ke pantai Danau Kembar namun belum membuahkan hasil dan kita minta tim sar terus berusaha dan menyalisir pantai. Kita juga minta agar nelayan lainnya hingga ke Nasal untuk juga ikut menyalisir pantai sekitar tempat tinggal mereka. Untuk mencari keberadaan korban yang sampai saat ini belum juga kita temukan," pungkas Kapolres Kaur.

Untuk diketahui Minggu dini hari kedua korban bersama satu korban yang selamat bernama Aksi (17) berencana melaut mencari ikan. Namun baru sekitar 100 meter ke tengah laut kapal ketiganya diterjang gelombang tinggi hingga akhirnya kapal terbalik dan kemasukan air. Saat itu lah ketiga korban terpisah dan menyelamatkan diri berenang ke tepi pantai. Naas dua rekan Aksi, nampaknya gagal menuju ke tepi pantai lantaran terseret arus gelombang yang tinggi dan sampai saat ini belum ditemukan. (cik)

4 Prinsip Utama
PROTOCOL KESEHATAN MENUJU KEHIDUPAN
NEW NORMAL

MASKER
Selalu menggunakan Masker dalam kegiatan apapun, baik itu didalam Ruangan maupun diluar

SEHAT
Hanya yang sehat yang boleh keluar rumah, yang merasa tidak sehat tetap dirumah

JARAK AMAN
Tetap jaga jarak aman minimal 5 meter saat berinteraksi dengan siapapun

KAPASITAS TEMPAT 50%
Ketika mendatangi suatu tempat & kapasitas sudah terisi penuh, disarankan tidak masuk karena hanya 50% kapasitas yang diizinkan

#BersamaLawanCovid-19 New Normal#



TIBA: Logistik pilkada Kaur saat ini mulai tiba di gudang KPU Kaur.

2.590 Pemilih Belum Rekam E-KTP

KOTA BINTUHAN - Masih banyaknya pemilih di Kabupaten Kaur yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun belum mempunyai E-KTP menjadi perhatian serius bagi KPU dan Dukcapil Kaur. Jumlahnya mencapai 2.590 pemilih. Sementara pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang.

Untuk menuntaskan rekam data pemilih yang masuk DPT tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kaur bersama KPU Kaur akan menggandeng PPK dan PPS. Untuk menelusuri siapa saja warga yang masuk DPT namun belum rekam data di setiap kecamatan dan desa. Kemudian meminta mereka melakukan rekam data di titik yang telah ditentukan di setiap kecamatan. Sehingga mereka pun tidak perlu lagi datang ke Dukcapil untuk melakukan rekam data nantinya.

Sekretaris Dukcapil Kaur Yanuar Afriko saat dikonfirmasi membenarkan kalau masih banyak pemilih yang sudah masuk DPT namun belum rekam data. Pihaknya tentunya tidak bisa jalan sendiri, karena tidak mengetahui siapa saja yang masuk DPT yang sampai saat ini belum rekam data KTP. Untuk itu pihak Dukcapil meminta KPU Kaur memanfaatkan PPK dan PPS untuk ikut turun jemput bola agar pemilih ikut rekam data KTP.

"Kita sudah koordinasi dengan KPU Kaur dan kita juga siap turun lagi ke kecamatan untuk melakukan rekam data untuk pemilih yang masuk DPT namun

belum ada KTP. Namun kita minta PPK dan PPS juga ikut mendata mana saja pemilih yang belum rekam data untuk diajak rekam data. Dan kita siap datang di titik kumpul yang disepakati oleh PPK dan PPS nantinya," ungkap Yanuar Afriko.

Terpisah anggota KPU Kaur, Divisi Data Sirus Legiati membenarkan kalau pihaknya dan Dukcapil saat ini telah menyusun jadwal untuk melakukan rekam data e-KTP. Bahkan pihaknya telah koordinasi dengan pihak kecamatan, PPK dan PPS untuk mengutamakan rekam data pemilih yang masuk DPT. "Kita juga akan koordinasi dengan pihak PLN, jangan sampai saat rekam data nantinya mati lampu. Sementara waktu terus berjalan dan kita harapkan sebelum 9 Desember 2020 semua pemilih sudah rekam data khususnya yang namanya sudah ada di DPT," pungkas Sirus.

Dari data yang ada 2.590 pemilih yang belum rekam data e-KTP terdiri dari laki-laki sebanyak 1.465 pemilih dan perempuan 1.125 pemilih. Mereka tersebar di 15 kecamatan yaitu Kaur Selatan sebanyak 210 pemilih. Kaur Tengah 35 pemilih, Kaur Utara 66 pemilih, Kelam Tengah 179 pemilih, Kinal 160 pemilih dan Kecamatan Luas 86 pemilih. Kecamatan Lungkung Kule 109 pemilih, Maje 403 pemilih, Muara Sahung 264 pemilih. Kecamatan Nasal 381 pemilih, Padang Gucci Hilir 127 pemilih, Padang Gucci Hulu 120 pemilih. Semidang Gumay 94 pemilih, Tanjung Kemuning 222 pemilih dan Kecamatan Tetap 134 pemilih. (cik)

Pelantikan CPNS Paling Cepat Desember

KOTA BINTUHAN - Pada hari terakhir penerimaan berkas dan syarat CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2020 kemarin (16/11) sebanyak 102 CPNS baru sudah menyampaikan berkas ke BKD dan PSDM Kaur. Dengan demikian, proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) akan segera diusulkan oleh BKD dan PSDM ke BKN dalam waktu dekat. Sehingga paling cepat bulan Desember 2020 yang akan datang 102 CPNS baru dilantik menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Kaur.

Kepada RB, Kepala BKD dan PSDM Kaur Arsal Adelin melalui Kabid Mutasi Yosi Afriyanti mengatakan kalau semua peserta CPNS yang lulus sudah menyampaikan berkas. Bahkan semua

berkas persyaratan semua CPNS baru tidak ada yang bermasalah dan akan segera diusulkan untuk proses pembuatan NIP di BKN. Setelah NIP setiap CPNS baru nanti keluar baru pihak BKD dan PSDM Kaur akan melakukan pelantikan CPNS baru untuk tahun penerimaan 2019.

"Yang pasti 102 berkas dan syarat CPNS baru semuanya sudah masuk dan sudah kita terima. Jadi tidak ada yang mengundurkan diri atau tidak menyampaikan berkas ke BKD dan PSDM Kaur. Untuk pengusulan pembuatan NIP secepatnya dan kita berharap kalau bisa Desember 2020 semua CPNS Kaur juga bisa dilantik seperti kabupaten dan tempat lainnya," pungkas Kabid Mutasi BKD dan PSDM Kaur, Yosi Afriyanti. (cik)

Logistik Pilkada Disimpan di Gudang KPU

KOTA BINTUHAN - Pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari. Saat ini berbagai kelengkapan atau logistik untuk pilkada di Kabupaten Kaur mulai tiba. Selain kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang sudah tiba di gudang KPU Kaur. Kemarin (16/11) giliran kotak suara, bilik suara dan juga tinta untuk pilkada Kaur pun telah tiba di gudang KPU Kaur.

Jumlah bilik suara yang tiba kemarin sebanyak 1.300 bilik suara. Sementara untuk kotak suara yang tiba kemarin juga sebanyak 318 kotak suara. Dalam waktu dekat, secara bertahap semua logistik untuk pilkada Kaur nantinya akan dibagi ke setiap TPS.

"Alhamdulillah secara bertahap logistik untuk pilkada Kaur telah tiba, baik itu bilik dan kotak suara. Untuk lainnya juga secara bertahap juga akan tiba karena untuk kali ini selain logistik untuk pilkada ada juga APD (alat pelindung diri) untuk antisipasi Covid-19. Dan semua TPS nantinya wajib dilengkapi dengan APD di masa pandemi Covid-19 ini semua harus sesuai protokol kesehatan Covid-19," ungkap Ketua KPU Kaur Meixxy Rismanto.

Tidak hanya itu saja beberapa logistik lainnya pun

saat ini mulai masuk, untuk perlengkapan mulai pengikat dan sebagainya. Sementara saat ini KPU Kaur sendiri masih dalam proses untuk pencetakan surat suara yang akan dipergunakan untuk pemilihan menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kendati demikian persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh KPU Kaur jelang Pilkada serentak Desember 2020 yang akan datang.

"Kita pastikan semua logistik yang kita butuhkan termasuk surat suara nantinya bisa datang sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Karena selain tiba di Kaur semua perlengkapan logistik ini juga akan kita distribusikan ke setiap TPS yang ada di Kaur sebelum tanggal 9 Desember 2020," pungkas Ketua KPU Kaur.

Sementara untuk pilkada Kaur tahun 2020 ini jumlah TPS jauh berkurang dari pemilu 2019 yang lalu. Jumlah TPS sebanyak 318 TPS yang tersebar di 15 kecamatan, 195 desa dan kelurahan yang ada di Kaur. Dari 318 TPS yang ada di Kaur terdapat 55 TPS sulit yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kaur. Dan ini harus menjadi perhatian KPU Kaur dalam penyaluran logistik nantinya hingga bisa bisa tiba sesuai dengan rencana. (cik)

Panwascam Lantik 318 PTPS

KOTA BINTUHAN - Secara serentak Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Kaur kemarin (16/11) melantik 318 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kabupaten Kaur. Dengan dilantikanya pengawas TPS ini, maka mulai kemarin mereka sudah siap menjalankan tugas dan menjadi ujung tombak pengawasan Pilkada Kaur.

Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo saat dikonfirmasi mengakui kalau semua pengawas TPS sudah dilantik oleh 15 Panwascam yang ada di Kaur. Pelantikan dilakukan lebih cepat sebelum dilantikanya KPPS yang nantinya akan bertugas di setiap TPS pada Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Untuk itu Toni meminta agar pengawas TPS nantinya dapat bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan saat pencoblosan.

"Untuk pengawas TPS ini akan bekerja selama 30 hari, mereka akan mulai melakukan pengawasan 23 hari sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 9 Desember. Dan tujuh hari setelah pencoblosan nantinya selama bertugas mereka akan mendapatkan honor sebesar Rp 650 ribu. Untuk itu kita harapkan mereka yang dilantik Panwascam hari ini (kemarin red) bisa mem-

bantu kita dalam melakukan pengawasan saat pencoblosan nantinya," tegas Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo.

Untuk diketahui setiap TPS nantinya akan ditempatkan satu PTPS mereka akan bertugas melakukan pengawasan mulai dari terbentuknya KPPS. Kemudian pembuatan TPS hingga usai penghitungan suara di tingkat TPS. Sebelum diturunkan nantinya PTPS tentunya akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bawaslu Kaur dan juga Panwascam di setiap kecamatan. Terkait cara kerja dan sistem pengawasan hingga membuat laporan jika ada temuan terkait pelanggaran di setiap TPS nantinya.

Ketua Panwascam Kecamatan Kaur Selatan Adam Iskandar saat dikonfirmasi mengaku telah melakukan pelantikan untuk PTPS di Kecamatan Kaur Selatan sebanyak 34 PTPS. Menurut Adam, usai dilantik PTPS hasil seleksi yang telah dilakukan pihaknya selama ini diharapkan bisa membantu Panwascam pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. "Alhamdulillah semua berjalan lancar dan semua pengawas TPS untuk Kaur Selatan sudah kita lantik," pungkas Adam Iskandar kemarin. (cik)

Didukung KPR Bank **BTN**

BERKAH KANDANG MAS 3

RUMAH TYPE 36 SUBSIDI

Jl. Sumas Raya / Jl. Kandang Mas 3 BENGKULU

Kualitas Komersial
Lokasi Strategis
Bebas Banjir

DP cukup 5 Jt
Terima Kunci
*SKB

Segera Hubungi! Ansuran Mulai Rp. 877.741,-

0853 8129 3398
0853 8198 0149 STOK TERBATAS..!

PT. BERKAH IDAMAN MANDIRI
CONTRACTOR - DEVELOPER - TRADING
Jl. Tri Bata No. 11 Telp. (0736) 52319 Bengkulu. Email : btm_bkh@yahoo.com

FREE ANGSURAN 3 BULAN
Khusus Tipe Mobilio

DP MULAI 19^{Juta}

DP MULAI 20^{Juta}

ARISTA
Terbaik dan Terpercaya

Info lebih lanjut kunjungi:
<https://form2.jakarta.googlesite.com/berkahterbaikdanterpercaya>

FREE PAKET HEMAT SERVICE
Untuk semua tipe

Jam Buka Showroom
Penjualan : Senin-Sabtu Jam 08.00-19.30 WIB Bengkel : Senin-Sabtu Jam 08.00-17.00 WIB
Minggu Jam 08.00-16.00 WIB

Honda Arista
@hondaarista
www.honda-arista.co.id

HONDA ARISTA BENGKULU
JL. ADAM MALIK RT 01 RW 01 PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
TELP: 0736-5511888

PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER

VIMAX OIL & LINTAH OIL
(satu Menit Dioles Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)

~ **VIMAX OIL** : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanen untuk selamanya.

~ **PROKOMIL SPRAY** : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam.

~ **Sony Tablet** : Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syahwat/impotensi, K. Manis, M. Encer, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membuang serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti.....

~ **CREAM PAYUDARA** : Membesarkan, memadatkan, memotokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya.

~ **JUGA TERSEDIA** : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi Badan/Pembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, juga tersedia berbagai merk jamu import yang lain. Tersedia accessories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern.

HUBUNGI DISTRIBUTOR
HU - SENG
Jl. Tenggiri No.20 Depan Pasar Ikan
Kampung Cina Kota Bengkulu
HP. 0821 8270 7707

Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim

Lagi, Jenazah Dimakamkan Tanpa Prokes

Hasil Swab Positif Corona

ARGA MAKMUR – Setelah satu kasus di Kecamatan Arga Makmur, kali ini terjadi lagi kasus jenazah positif Covid-19 yang dimakamkan tanpa protokol kesehatan (Prokes). Kali ini pemakaman jenazah Covid-19 dengan cara biasa terjadi di Kecamatan Lais.

Bukan hanya tidak dengan prokes, namun jenazah disemayamkan dan dimandikan

kembali di rumah duka. Termasuk dimakamkan layaknya jenazah biasa dengan kerumunan warga kejadian ini terjadi 10 November lalu.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Ujang Ismail, SKM, M.Ph menuturkan jika pasien lebih dulu dirawat di RSUD Arga Makmur sebelum meninggal. Tim medis sudah menyatakan jika pasien tersebut propable atau suspect Covid-19 dengan

ciri media yang dialami pasien. “Sudah kita ambil swab dan dinyatakan pasien tersebut suspect Covid-19,” terangnya.

Namun memang sebelum hasil swab terbit, kondisi pasien memburuk dan akhirnya meninggal dunia. RSUD sudah berencana akan melakukan pemulasaran dan pemakaman sesuai prokes, atau setidaknya dilakukan pemulasaran secara protokol Covid dan selanjutnya bisa langsung dimakamkan

oleh keluarga di pemakaman umum.

“Namun memang keluarga menolak, keluarga tetap ingin melakukan perawatan jenazah seperti biasanya. Sehingga memang kita tidak bisa memakamkan hal tersebut, apalagi memang kondisi keluarga yang sangat berduka dan belum terbit hasil swab,” terangnya.

Setelah beberapa hari pasien dimakamkan, Satgas Covid-19 baru mendapatkan hasil jika

sample swab yang dilakukan ternyata positif Covid-19. Satgas juga sudah melakukan tracking dengan melakukan pemeriksaan pada warga yang melakukan kontak erat, termasuk dengan keluarga.

“Mereka yang memang kontak erat dan bersedia dilakukan swab, kita ambil sample swab dan sudah kita kirimkan ke Satgas Provinsi untuk dilakukan uji laboratorium,” terangnya.

Dengan bertambahnya satu

kasus meninggal dunia tersebut, jumlah kasus positif Covid-19 di BU menjadi 5 orang. Saat ini BU terdiri dari 75 kasus Positif Covid-19. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol Covid-19 sehingga bisa memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Kita terus berusaha menekan angka penambahan Covid-19, namun hal itu bisa kita lakukan jika memang masyarakat patuh pada protokol kesehatan,” imbuh Ujang. (qia)

POLING CABUP DAN CAWABUP BENGKULU UTARA PILIHAN PEMBACA RB



15

Ir. H. Mian Arie Septia Adinata



PENGHARGAAN: Kakanwil Djpb saat memberikan penghargaan pada Pjs Bupati BU Iskandar ZO.

Patuh Aturan, Kakanwil Yakin BU Bisa WTP Lagi

Djpb Beri Tiga Penghargaan Terbaik

ARGA MAKMUR – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu kemarin mengunjungi Bengkulu Utara (BU). Ia memberikan tiga sertifikat penghargaan terkait dengan pengelolaan keuangan 2019. Ini setelah ini BU mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2018, 2019, 2020 untuk pengelolaan keuangan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Djpb Provinsi Bengkulu Ismed Saputra, SE, MM menuturkan BU memang menjadi kategori terbaik dalam pengelolaan keuangan

dan penyajian laporan. Penghargaan tersebut diberikan atas pengelolaan keuangan 2019 lalu yang dilaksanakan Pemkab BU.

“Jadi penghargaan ini atas laporan dan pengelolaan keuangan tahun 2019. Kita nilai penjadiannya sudah sesuai aturan dan jika memang hal tersebut konsisten, saya yakin bukan tak mungkin akan mendapatkan status WTP untuk keempat kalinya,” terangnya Ismed.

Selain sertifikat WTP, Ismed kemarin juga mengantarkan penghargaan terbaik kategori Sistem Informasi Kredit (SIKP) KUR tingkat Provinsi dan peringkat terbaik penyaluran Dana Desa (DD). Ketiganya adalah

pengelolaan anggaran 2019.

“Jadi memang penyajian informasi dan penyaluran yang dilakukan Pemkab BU untuk program KUR dan Dana Desa terbaik diantara kabupaten lain berdasarkan penilaian kita,” terangnya.

Sementara Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan BU mendapatkan tiga kali berturut-turut WTP di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Mian dan Wabup Arie Septia Adinata, SE, M.Ap. Bahkan, ia menargetkan audit BPK 2021 kembali mendapatkan opini WTP.

“Pak Mian dan Pak Arie sebagai Bupati dan Wabup saat itu memang menekankan pada seluruh pejabat,

terutama pengelola anggaran. Jangan bermain dengan anggaran. Ini hasil yang kita dapatkan, tiga kali WTP dan target kita mendapatkan WTP keempat,” tegas Sekda.

Tahun ini Pemkab BU banyak mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun ia pastikan semua pengalokasian anggaran maupun belanja yang terkait penanganan Covid-19 dipastikan sudah sangat sesuai dengan aturan.

“Nantinya tentu dana penanganan Covid-19 akan masuk dalam item audit, dan kita yakin kita kembali mendapatkan status WTP di tahun depan,” tegas Sekda. (qia)



APD PEMILU: APD untuk hari H pencoblosan sudah siap di gudang KPU.

APD Saat Pencoblosan Siap Dibagi

ARGA MAKMUR – KPU Bengkulu Utara (BU) sudah menerima Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan pencegahan penyebaran Covid-19. APD ini digunakan saat pemungutan suara 9 Desember di 637 TPS di 19 Kecamatan, 215 desa dan 5 kelurahan di BU.

Diantara APD yang datang tersebut adalah masker kain, sarung tangan plastik, tisu, kantong plastik sampah, dan face shield. Selain itu ada juga semprotan, sabun cuci tangan, set tempat cuci tangan dan disinfektan.

Ketua KPU BU Suwanto, SH menuturkan jika perlengkapan tersebut nantinya akan disebarkan ke seluruh TPS dan penyelenggara pemilu. Bukan hanya untuk penyelenggara hingga ke TPS, namun juga ada barang yang digunakan untuk pemilih.

“Kita siapkan sarung tangan plastik bagi pemilih. Jadi mereka yang masuk menggunakan sarung tangan plastik sehingga saat memegang kertas tidak terjadi penularan,” terangnya.

Selain itu nantinya akan diberikan tisu untuk digunakan saat meneteskan tinta usai masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Saat ini APD tersebut sudah kita simpan di gudang KPU untuk dibagikan ke seluruh TPS bersama dengan logistik pemungutan suara.

“Jumlahnya sudah kita hitung, lebih dari kebutuhan yang kita butuhkan. Tentunya kelebihan ini akan kita cek jika memang ada kerusakan akan kita ganti dengan yang baru,” terangnya.

Saat BU masih dalam status zona oranye penyebaran Covid-19 dan jumlah kasusnya terus bertambah. Sehingga ia benar-benar mengingatkan pada seluruh penyelenggara hingga ke tingkat TPS untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Dengan adanya APD yang digunakan untuk penyelenggara dan pemilih, kita yakin bisa menghindari terjadinya penularan. Hanya saja sangat mengimbau agar pemilih yang datang ke TPS patuh,” imbuh Suwanto. (qia)



TABRAK LARI: Polisi saat melakukan pengumpulan data pada korban tabrak lari.

Minibus Hitam Tabrak Ibu dan Anak, Lalu Kabur

ARGA MAKMUR – Tabrak lari terjadi di Kota Arga Makmur Bengkulu Utara (BU) pukul 12.00 WIB kemarin. Kecelakaan menimpa Else (21) warga Desa Rama Agung Arga Makmur yang membongceng ibunya, Wati, persis di depan persimpangan kediaman dinas Bupati dan Ketua DPRD BU.

Akibat kecelakaan ini, kedua korban dilarikan ke Puskesmas Gunung Alam Arga Makmur dengan kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, motor Honda Scoopy yang dikemudikan korban juga ringsek akibat kecelakaan tersebut.

Kecelakaan ini terjadi saat korban melaju dari arah kantor Bupati BU menuju Kelurahan Kemumu. Tiba-tiba dari arah belakang datang mobil mini bus dengan kecepatan tinggi dan me-

nabrak korban dari arah belakang hingga keduanya terjungkal.

Else menuturkan jika dirinya sempat melihat mobil yang menghantamnya dari belakang tersebut. Meski tak mengingat nomor polisi kendaraan, namun mobil tersebut berjenis mini bus warna hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi.

“Mobil itu juga pasti bagian kanannya depannya rusak, karena memang menghantam kami keras. Usai menabrak kami, tidak berhenti sama sekali langsung melaju lurus ke arah Kemumu,” terangnya.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat Lantas Iptu. Yenni Puspita, SH menuturkan jika polisi sudah melihat kondisi korban dan melakukan penyelidikan. Termasuk

menyebarkan informasi terkait kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan tersebut.

“Anggota sudah datang memintai keterangan singkat dari korban, termasuk dari warga yang melihat kejadian untuk berusaha mencari kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut,” terangnya.

Ia juga mengimbau pengendara kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut untuk melapor ke Polisi sehingga bisa mempermudah penyelidikan yang dilakukan Polisi. Sehingga memang perkara ini bisa segera menemukan titik temu.

“Kita mengimbau pengemudi kendaraan yang merasa terlibat dalam kecelakaan tersebut untuk melapor ke Polisi, memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut,” imbuh Kasat. (qia)

Corona Meledak, Pemkab Ambil Langkah

ARGA MAKMUR – Saat ini kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu terus meningkat, bahkan lonjakan kasus positif Covid-19 di Bengkulu Utara (BU) dalam sebulan belakangan hingga 50 kasus. Bahkan saat ini BU menjadi daerah kelima di Provinsi Bengkulu dengan jumlah positif Covid-19 sebanyak 65 kasus dengan lima diantaranya meninggal dunia.

Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menuturkan jika Pemkab BU akan mengambil langkah terkait dengan meledaknya kasus Covid-19 di BU. Bahkan kemarin Pjs Bupati Dr. Iskandar ZO, SH, M.Si kemarin mengajukannya bersama seluruh pejabat yang terkait dengan penanganan Covid-19 untuk rapat internal.

“Jadi hari ini kami dipanggil Pak Pjs Bupati untuk membahas lonjakan kasus tersebut. tentunya untuk menyiapkan solusi terkait lonjakan kasus Corona,” terangnya.

Ia menegaskan dalam pembahasan tersebut Pemkab BU akan mencari solusi untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di BU. Termasuk menanggulangi dampak-dampak yang terjadi akibat penyebaran Covid-19 tersebut.

“Nanti akan kita sampaikan terkait langkah-langkah yang akan kita ambil untuk penanganan Covid-19 dan menekan angka penyebaran Covid-19,” terangnya.

Saat ini penyebaran Covid-19 sudah hampir terjadi di seluruh Kecamatan, bahkan seluruh klaster penyebaran Covid-19 di BU sudah ada mulai dari perkantoran, pusat keramaian, sekolah hingga tenaga medis. Sedangkan saat ini di BU masih diperbolehkan melakukan pesta dengan mengundang masyarakat.

Meskipun sesuai aturan wajib mengikuti protokol kesehatan, namun yang sering terjadi justru penyelenggara pesta tidak mengindahkan protokol kesehatan.

“Memang sesuai dengan Perbup 50/2020 pesta pernikahan diperbolehkan, namun wajib dengan protokol kesehatan. Dengan kondisi sekarang, akan kita bahas lebih dulu apakah memang ada perubahan atau kita perketat kembali,” pungkas Haryadi. (qia)

BERDAYA MAKSI

<p>SPACE IKLAN</p>	<p>SUDAH LAKU</p>	<p>SPACE IKLAN</p>	<p>SUDAH LAKU</p>	<p>SPACE IKLAN</p>	<p>SUDAH LAKU</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DIKONTRAKAN SATU RUMAH Alamat: Jl. Iskandar, Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bkt. Fasilitas: - 3 kamar tidur, 1 toilet, Teras Bkt, R. Dapur, R. Tamu, R. Klurga, R. Cucu Jemur dan R.Makan. - AC, lemari baju, tmpat tdr, kursi tmu, kulkas, meja mkn, Jet PAM, listrik 1300 wat. Harga 19 JT NEGO Minat Hub. 081977004862 / 08117315116</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>CV WIRA JAYA COMPUTER</p> <p>Menjual Dan Menyediakan Rental Dan Sewa Laptop Dan Pc Computer, Jumlah Unit Banyak. Alamat: Jl. Meranti Raya, Sawah Lebar, Hubungi : 082186132771/081367379494</p> </div> </div>					

Rakyat Bengkulu PILKADA

SELASA, 17 NOVEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 8

Info Bawaslu



KODE ETIK: Rapat persiapan sidang dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu.

Sosialisasi Kode Etik

BENGKULU - Bertempat di Madeline Hotel, DKPP RI mengundang Bawaslu Provinsi Bengkulu, Tim Pemeriksa Daerah unsur Bawaslu Provinsi dan Tokoh Masyarakat, Bawaslu dan KPU Kota Bengkulu, Bawaslu dan KPU Kabupaten Seluma, Bawaslu dan KPU Bengkulu Tengah dalam agenda Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dr. Alfitra Salam Majelis DKPP RI menyampaikan tidak perlu ada pro dan kontra lagi terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi seperti saat ini. "Kita harus meyakini bahwa pelaksanaan pilkada ini sehat dan tidak menimbulkan klaster baru. Kita harus memprioritaskan sosialisasi kepada paslon. Harus bisa menunjukkan kepada masyarakat terkait kepedulian terhadap covid," jelasnya.

Ia juga menjelaskan konsep kerjasama KPU dan Bawaslu harus seirama dan kerja sama tetap harus diprioritaskan, komunikasi yang baik antara KPU dan Bawaslu harus tetap berjalan. Majelis DKPP ini juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran kode etik meningkat pada saat pelaksanaan pilkada.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap dalam sambutannya menyampaikan kenetralan merupakan hal yang paling prioritas. "Sebagaimana pernah disampaikan Prof. Jimly, bahwa jangankan tidak netral, terlihat tidak netral pun itu sudah bermasalah," ujarnya. (**)



AYO BAYAR PBB TEPAT WAKTU

BADAN KEUANGAN DAERAH BENGKULU TENGAH



DEBAT: Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan mengikuti debat terbuka, Senin (16/11).

Semua Paslon Janji Sejahterakan Masyarakat

KOTA MANNA - Debat terbuka perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) digelar KPU BS kemarin (16/11). Empat paslon memaparkan visi dan misi serta program masing-masing untuk menyakinkan masyarakat BS menentukan pilihannya. Debat dipandu oleh moderator Pihan Pino, M.IKom.

Paslon nomor urut 1, Hartawan-Darmin menyampaikan visi misi mereka membangun masyarakat BS religius dan bermartabat, maju bersama dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional. Mereka juga akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

"Pemerintahan Hartawan-Darmin tidak akan mengobrol

janji, tetapi siap memberikan bukti," papar Hartawan.

Sedangkan paslon nomor urut 2, Budiman Ismaun-Helmi Paman mengatakan mereka akan mewujudkan masyarakat BS sejahtera dan berdaya saing. Disebutkan Budiman, peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, apiratif, partisipatif dan transparan.

"Birokrasi yang baik maka pemerintahan akan berjalan baik. Selain birokrasi, kita telah menyusun program prioritas seperti perluasan pertanian dan lainnya," ujar Budiman.

Paslon nomor urut 3, Gusnan Mulyadi-Rifai Tajuddin juga menjanjikan masyarakat BS yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Visinya, terwujudnya masyarakat madani

menuju BS EMAS berlandaskan cinta BS. "Di saat yang lain baru berencana melakukan programnya, kami telah memulainya," tegas Gusnan.

Sementara itu, paslon nomor urut 4, Dewi Sartika-Marwan Iswandi memaparkan visi mereka yaitu terwujudnya masyarakat BS yang berempati, mandiri, tangguh, berbudaya dan tenteram. Dengan misi meningkatkan kualitas SDM yang berwawasan unggul. "Kami akan menjadikan BS lebih baik, dengan moto pemimpin adalah pelayan dan rakyat adalah rajanya," terang Dewi Sartika atau akrab dipanggil Rika Yohan ini.

Ketua KPU BS, Alpin Samson, S.Pt mengatakan, debat terbuka ini untuk memberikan referensi agar masyarakat dapat menentukan pilihannya. "Kami mengajak masyarakat BS untuk datang ke TPS 9 Desember nanti," ajak Alpin. (tek)

Poling Pasangan Cagub-Cawagub & Cabup-Cawabup Pilihan Pembaca RB

Dukung Pasangan Cagub-Cawagub dan pasangan Cabup-Cawabup Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Mukomuko. periode 2021-2026 pilihan Anda

Pasangan Cagub-Cawagub :

Pasangan Cabup-Cawabup :

IDENTITAS PENGIRIM

Nama :
No HP :
Alamat :

Kirim guntingan formulir ini ke Graha Pena RB Jalan P Nataditja Km 7,5 Kota Bengkulu. Dilengkapi dengan fotocopy KTP

Dugaan Pelanggaran Diproses Bawaslu

BENGKULU - Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Dodi Herwansyah,

S.Pd, MM menyampaikan pihaknya akan memproses setiap laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran pilkada. Termasuk laporan yang disampaikan Pemuda Pancasila, kemarin.

"Adanya dugaan tangkap tangan. Kami belum memeriksanya. Apakah itu termasuk kategori pelanggaran atau bukan. Akan kita periksa dulu," kata Dodi. Dodi berharap partisipasi masyarakat lebih aktif untuk mengawasi hingga melaporkan indikasi pelanggaran pilkada serentak ini.

Diketahui Pemuda Pancasila Bengkulu bersama Paslon Nomor Urut 3, Tarmizi Gumay, SH, MH menyambangi kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu kemarin. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran pilkada sekaligus menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal tahapan pilkada ini. Juga meminta Bawaslu benar-benar menindaklanjuti laporan atas temuan dugaan pelanggaran tersebut.

"Didapati pembagian untuk mempengaruhi mata pilih, tadi sudah diamankan. Secara prosedur telah dilaporkan ke Bawaslu. Maka kami minta Bawaslu untuk profesional menanganinya," tegas Tarmizi. (war)

GUNAKAN HAK PILIH ANDA 9 DESEMBER 2020

DATANGI TPS DAN PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

MEMILIH PASLON ATAU KOLOM KOSONG SAH DILINDUNGI KONSTITUSI

PILIHAN ANDA MENENTUKAN MASA DEPAN DAERAH

Pesan ini disampaikan oleh:

KOMISI PERLOMBAAN

KPU Kabupaten Bengkulu Utara

YAMAHA

LEBIH STYLISH

#GENERASI 125 MENANG BANYAK

X-RIDE 125

yamaha.hamrin.bengkulu

JOIN US NOW !!!

Nusa Tour & Travel

TURKISH AIRLINES

Turkey Explore 100.000

Rp. 13.800.000

Depot/Ditir: Khusus Dan Souvenir: Cantik Untuk Yang OD 14-17 Agustus 2020 !!!

137 667 137 1100 0500
1156 157 628 0220 1800

12-21 Oct 2020
09-18 Nov 2020
23 Nov - 02 Des 2020

Contact Person :
0812 9296 976 (Rose), 0813 7783 8875 (Yenny)



SUZUKI DP Mulai **20Jtan*** **ALL NEW ERTIGA** DP Mulai **20Jtan*** **NEW IGNIS** DP Mulai **15Jtan*** **NEW CARRY** DP Mulai **15Jtan*** **GEMERLAP SUZUKI** **Gratis Oli - Sparepart s.d 50.000km*** **PICK-UP No.1** **DIUNDUKAN**

Head Office : Jl. May Jend. Subito No. 88 Kota Bengkulu, Telp : (0736) 28888/ 085 2222 11 767
 Outlet Perair : Jl. Lintas Bengkulu Padang De Sisodadi Perair, Telp: 0852-8635-888
 Outlet Ciang : Jl. Duren Daun (Simpang Merg) Kab. Korpri, Telp: 0821-7595-1628
 Outlet Manna : Jl. Ahmad Yani Kec. Ratu Kota Manna, Telp: 0821-7314-9541
 Jam Kerja Bengkulu : Senin - Jum Ah : 08.30wb - 18.30 WIB
 Sabtu : 08.30wb - 12.30 WIB
Hotline Service : 0821-7573-6233

APBD Diproyeksi Defisit Rp 150 Miliar

BENGKULU - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bengkulu 2020 diketahui bakal diproyeksi mengalami defisit mencapai Rp 150

miliar. Hal ini, disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan tak sesuai target, sebesar Rp 233 miliar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua

I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Bengkulu terhadap dua Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) Garis Sempadan Bangunan dan Raperda Penyertaan Modal BPRS Fadhilah, di Ruang Paripurna, Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu, Senin

(16/11). Dia menegaskan, saat ini anggaran Pemkot Bengkulu berada di zona merah. **Baca APBD...Hal 15**

CV. CENTRAL ELEKTRO
 JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU
 0736 7324 996 central_elektro.bkl
 0811 7360 422 centrarelektobengkulu.com

- PENGADAAN AC
- PENJUALAN AC
- SERVICE AC
- SPARE PART AC
- RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
- CCTV & SECURITY SYSTEM

HIKVISION
DAIKIN

XXI BenMall Dibuka Kembali

Terapkan Protokol Kesehatan

BENGKULU - Ini kabar baik bagi pecinta film bermutu di Bengkulu. Sejak Sabtu (14/11) lalu Bioskop XXI Bencoolen Mall (BenMall) sudah beroperasi kembali. Pembukaannya ditandai dengan seluruh theater yang tersedia menayangkan film-film, baik lokal maupun asing dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Divisi Marketing BenMall Widji Lestari mengatakan pembukaan Bioskop XXI ini pada pokoknya tidak berbeda seperti sebelum masa pandemi.



Baca XXI...Hal 15 **NONTON:** Terlihat warga tengah menonton film di Bioskop XXI yang baru dibuka dua hari lalu.

KATEGORI

1. AKTIVITAS SERU BERSAMA KELUARGA
2. GELIAT PEMBANGUNAN 52 TAHUN PROVINSI BENGKULU
3. UCAPAN HUT KE-52 PROVINSI BENGKULU

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Buat video Tik Tok dengan tema yang telah ditentukan (pilih salah satu tema)
2. Wajib follow akun media sosial instagram, facebook dan subscribe Youtube official Rakyat Bengkulu dan Media Center Provinsi Bengkulu
3. Upload video di Feed Instagram (IG) kamu, tag dan mention @rakyat_bengkulu_online dan @mediacenterbkl serta gunakan hashtag #tiktokchallenge #hutprovinsibengkulu #rakyatbengkulu
4. Cantumkan kategori pada caption postingan.
5. Akun tidak boleh digembok selama kompetisi berlangsung (set for public)
6. Keputusan pemenang oleh juri tidak dapat diganggu gugat
7. Kompetisi ditutup 24 November 2020
8. Pengumuman pemenang 28 November 2020
9. Hadiah Total Rp 15.000.000

JUARA 1 Rp 2.000.000 per kategori
JUARA 2 Rp 1.500.000 per kategori
JUARA 3 Rp 1.000.000 per kategori
JUARA FAVORIT (Like Terbanyak) Rp 500.000

Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, SE Sekda Provinsi Drs. Hamka Sabri, M. SI

LOMBA FOTOGRAFI

KATEGORI UMUM, TEMA : GELIAT PEMBANGUNAN DAN WISATA 52 TAHUN PROVINSI BENGKULU

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Foto hasil karya peserta dan belum pernah dilombakan pada event lain.
2. Foto diambil sepanjang Januari-November 2020
3. Objek foto adalah hasil pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu baik di Kota Bengkulu, maupun di kabupaten. Termasuk geliat spot wisata yang menjadi program Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Tidak diperkenankan menggunakan drone
5. Wajib follow akun media sosial Instagram, facebook dan subscribe Youtube official Rakyat Bengkulu dan Media Center Provinsi Bengkulu
6. Upload foto di Feed Instagram (IG) kamu, tag dan mention @rakyat_bengkulu_online dan @mediacenterbkl serta gunakan hashtag #lombafotohutprovinsike52 #rakyatbengkulupilihanutama
7. Akun tidak boleh digembok selama kompetisi berlangsung (set for public)
8. Jangan lupa registrasi gratis di bit.ly/LOMBAFOTOHUTBENGKULU
9. Panitia hanya akan memproses hasil karya peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan diatas.
10. Periode upload 6-24 November 2020
11. Pengumuman pemenang 28 November 2020
12. Keputusan pemenang oleh juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

JUARA 1 Rp 5.000.000
JUARA 2 Rp 3.000.000
JUARA 3 Rp 2.000.000

Plt. Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, SE Sekda Provinsi Drs. Hamka Sabri, M. SI

PGRI Kembali Datangi Dinas Dikbud

TPG Belum Juga Cair

BENGKULU - Setelah pengurus PGRI Kota Bengkulu mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu, giliran PGRI Provinsi Bengkulu menemui Plt Kepala Dinas Dikbud Eri Yulian Hidayat. Mempertanyakan kepastian pencairan TPG Triwulan III guru SMA/SMK/SLB. "Silaturahmi sekaligus koordinasi terkait tunjangan profesi guru triwulan III yang belum juga masuk ke rekening guru," kata Wakil Ketua I PGRI Provinsi Bengkulu Asep Suparman menjelaskan kdatangannya ke Dikbud Provinsi Bengkulu, Senin (16/11).

Baca PGRI...Hal 15

ASTRA MOTOR **55** **PEREMBUS BIKES**

PERIODE 1-30 Nov 2020
NARRUTO
NOVEMBER ANGSURAN RAH UNTUNG TOTAL
@HONDABENKULU

POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan
 POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan
 POT ANGSURAN Rp. 100 Ribu Perbulan
 POT ANGSURAN Rp. 25 Ribu Perbulan **GRATIS 1X**

MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?

HUBUNGI LAYANAN **care** **0819 2500 989** ATAU **1 500 989**

LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI : **MOTORKU** **DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERAL CODE : HNBKBL**

HALO DUKCAPIL **1500537**

Layanan Call Center Ditjen Dukcapil Kemendagri

PELAYANAN ADMINDUK SECARA ONLINE KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BENGKULU

KAB. BENGKULU SELATAN http://dukcapilbengkulselatan.outlook.com 081367233170; 082182614545; 082375992011	KAB. REJANG LEBONG Dukcapil Rejang Lebong 085282516608 (KK, KCT, NIK) 081173801174 (Simas, Zetas, Akta)	KAB. BENGKULU UTARA http://bit.ly/Permohonan_Cetak_KTP http://bit.ly/Permohonan_Cetak_Akta_Kelahiran_Adminii
KAB. KAUAB 081271421973; 08217526480; 082375509700	KAB. MUKOMUKO Dukcapil Mukomoko KULWALI PADJER (0827273195138)	KAB. LEBONG 085268012228 Layanan Dukcapil Lebong http://www.dukcapil.lebongkab.go.id
KAB. SELUMA 085279872644 Dukcapil Seluma pelayanan.dukcapil.seluma@gmail.com	KAB. BENGKULU TENGAH 085357899685; 081279555342 (Dukdik) 085273111146; 081271992092 (Capil)	KOTA BENGKULU Aplikasi SLAWI Download di App Store

Jl. Pembangunan No. 7 Padang Harapan Kota Bengkulu (0736)7326471 Fax (0736)7326083
 capil.provbk@gmail.com Dukcapil.bengkuluprov.go.id 08117311717
 Dukcapilprov Bkl @dukcapilprovbkl @CapilProvBkl

APBD Diproyeksi Defisit Rp 150 Miliar

Sambungan dari hal 9

Hal ini disebabkan apa yang direncanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim perencanaan Pemkot Bengkulu tidak sinkron dengan apa yang disampaikan Plt. Walikota Bengkulu dalam rapat paripurna. Dalam pembahasan pihak TAPD menjanjikan PAD bisa mencapai target bahkan mereka optimis dengan pencapaian PAD 2020.

"Artinya kalau DPRD mungkin sudah biasa dibohongi oleh TAPD, sekarang malah kepala daerah yang dibohongi oleh TAPD dan termasuk kepala OPD yang juga dibohongi oleh TAPD. Kenapa? Mereka menjanjikan untuk membuat program tapi uangnya tidak ada. Hari ini terbukti dan terungkap semua dalam paripurna," jelasnya.

Dia mengatakan, dampak dari itu, pembahasan APBD 2021 juga terkendala. Telah dijadwalkan sebanyak beberapa kali, namun selalu ditunda karena bahan pembahasan APBD 2021, TAPD tidak sediakan. "Berapa kali ditunda, sampai hari ini tidak ada kejelasan apakah bisa dibahas atau tidak," terangnya.

Anggota Komisi I dan tim pengantar DPRD Kota Bengkulu Ariyono Gumay juga menimpali masalah deficit tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kajian secara keuangan kepada tim TAPD bahwa melihat kondisi ekonomi saat ini tidak mungkin untuk menaikkan PAD. Namun saat itu TAPD meyakinkan bahwa PAD dapat dinaikkan. Maka dari itu ada kenaikan dari Rp 207 miliar menjadi Rp 233 miliar ada kenaikan sebesar Rp 26 miliar.

"Setelah disahkan kita sudah pastikan uangnya ada atau tidak target pencapaian PAD bisa atau tidak karena melihat kondisi. Pemkot meyakini bahwasanya PAD akan naik. Dan imbasnya kita defisit sampai Rp 150 miliar," ungkapnya.

Dilanjutkannya, jika dikalkulasi dari awal, tetap setelah APBD disahkan, DPA sudah terbit, baru pihak BPKAD tidak membuat atau menolak status DPA tiap OPD OPD hal tersebut tidak lazim. "Dalam sebuah penganggaran, jika DPA harus dilaksanakan,

kalaupun tidak dilaksanakan atau sudah dilaksanakan maka akan menjadi hutang Pemkot, kalau kita hutang itu kelalaian dari perencanaan TAPD," terangnya.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pendapat akhir Walikota Bengkulu terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Garis Sempadan Bangunan dan Raperda Penyertaan Modal BPRS, di gedung Paripurna DPRD Kota Bengkulu, Senin (16/11).

Terkait defisit anggaran tersebut, Plt Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan bahwa sistem anggaran pemerintah adalah sistem anggaran berimbang. Pada saat penyusunan pihaknya mengansumiskan pendapat PAD Rp 233 miliar, ditambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga nantinya berimbang, namun asumsi tersebut tidak sesuai dengan target sehingga terjadi defisit.

"Dalam perjalanan akibat Covid-19 ini asumsi pendapatan tadi tidak sesuai dengan target maka pemasukan kecil kemudian belanjanya jadi besar, maka terjadilah defisit anggaran," ungkap Dedy.

Target Pendapatan Provinsi Rp 2,8 Triliun

Sementara itu, Pemprov Bengkulu kembali melakukan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan untuk mengejar target pendapatan sebelum tahun anggaran berakhir. Hasil rapat evaluasi kemarin realisasi sampai saat ini baru 74,8 persen dari target Rp 2,8 triliun.

Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto, menerangkan, pihaknya masih mengejar target realisasi pendapatan dengan waktu yang tersisa saat ini. Untuk itulah evaluasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digiatkan, mengejar OPD yang mana saja masih bisa digenjot untuk pemasukan pendapatan bagi daerah.

"Hari ini (kemarin, red) merupakan rapat lanjutan sebelumnya awal bulan lalu. Mengevaluasi capaian pendapatan OPD dan target kedepan," kata Gotri.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa realisasi pendapatan provinsi saat ini sudah mencapai 74,89 persen dari target pendapatan setelah adanya refocusing sebesar Rp 2,8 triliun. Tujuan evaluasi dengan mengumpulkan seluruh OPD, untuk mengetahui sejauh mana pemasukan pendapatan masih bisa dikejar dan yang terdampak karena adanya pandemi Covid-19.

"Kita evaluasi mana yang masih dikejar dan mana yang benar-benar terdampak sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikejar realisasinya. Masih ada waktu untuk mengejar realisasi target," bebernya.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKD Provinsi Bengkulu, Sepra Agusri, menambahkan untuk PAD sudah mencapai 80,83 persen atau sebesar Rp 589

miliar lebih. Capaian ini sudah baik, meskipun terjadi penurunan realisasi dibandingkan tahun lalu karena imbas dari adanya pandemi Covid-19. Termasuk pendapatan secara umum yang berasal dari pemerintah pusat, mengalami penurunan.

"Kalau melihat perbandingan dari tahun sebelumnya, tentunya pasti turun karena kondisi saat ini. Tetapi target dalam capaian sebelumnya tetap baik," demikian Sepra.

Ketok Palu APBD Terancam Molor

Di sisi lain, Ketok palu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021 terancam molor. Lantaran sampai saat ini KUAPPAS APBD belum juga disepakati. Pembahasan KUA-PPAS antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD pun beberapa kali ditunda.

Hal ini diakui anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Sami. Menurut target ketok palu yang biasanya paling lambat 31 November, untuk APBD 2021 kemungkinan besar tidak akan tercapai. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan November sementara KUAPPAS APBD 2021 saja belum disepakati.

"Sudah berapa kali dijadwalkan untuk pembahasan tapi harus ditunda, terakhir alasan penundaan kemarin karena harus mengingat dulu kegiatan ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD))," ujar Edwar.

Lanjutnya, dalam SIPD setelah KUA dan PPAS disepakati, secara sistem langsung masuk ke tahap raperda dan pagu PPAS yang telah disepakati tidak dapat lagi diubah. Perubahan hanya bisa dilakukan di rincian anggaran tanpa merubah pagu anggaran. "Kalau SIPD selesai, baru pembahasan KUAPPAS dimulai untuk kemudian disepakati," jelas Edwar.

Keterlambatan pembahasan KUA-PPAS 2021 ini, sambung Edwar, bukan semata dikarenakan keterlambatan pihak eksekutif menyerahkan KUA-PPAS, namun juga dikarenakan menunggu Peraturan Mendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2021 yang tahun ini juga terlambat turun. Sehingga mempengaruhi KUAPPAS.

"Biasanya Permendagri ini Mei sudah turun, dan Juli KUAPPAS APBD sudah diserahkan. Tapi tahun ini permendagri baru turun September. Kita maklumi ini juga karena kondisi sedang pandemi Covid-19," tukas Edwar.

Sementara itu rencana penerimaan daerah tahun anggaran 2021 yang tertuang dalam proyeksi KUAPPAS yang disampaikan kepada DPRD, sambung Edwar, mencapai Rp 3,055 triliun. Pada tahun 2021, kebijakan umum anggaran masih mengacu pada visi misi gubernur dan revisi RPJMD. Begitupun untuk penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas.

Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto menerangkan pihaknya masih menunggu SIPD selesai dicetak, untuk kemudian baru bisa dilanjutkan pembahasan KUAPPAS bersama DPRD. "Iya karena memang terkendala printout, karena kita sudah menggunakan SIPD. Setelah selesai langsung kita sampaikan kembali dengan DPRD, dan menunggu jadwal ulang dari DPRD," demikian Gotri. (juu/key)

Belum Semua Desa Tuntaskan Laporan

BENGKULU - Penyerapan Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai dengan 10 November, atau tepat hari Pahlawan telah memasuki babak akhir. Alasannya dari total Pagu yang sebesar Rp 1.085.020.660.000 yang sudah berada di Rekening Kas Desa (RKD) menembus angka Rp 964.900.202.000 atau sebesar 88,9 persen. Itu berarti sisa dari pagu sudah tak banyak lagi, alias hanya sebesar Rp 120.458.000 atau hanya tinggal 11,1 persen.

Kepala DJPb Provinsi Bengkulu Ismed Saputra mengatakan besarnya jumlah pagu sampai ke rekening kas desa, memang sudah

menjadi keinginan Pemerintah Pusat. Terlebih setelah Kementerian Keuangan sudah menerbitkan aturan baru yang menginginkan agar kerumitan penyaluran dana desa dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) langsung masuk ke Rekening Kas Desa. "Jadi tidak lagi masuk ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang terkesan terlalu birokratis," jelasnya. Dengan masuknya duit dana desa ke Rekening Kas Desa membuat mereka lebih leluasa menggunakan anggaran yang tersedia sesuai peruntukan asal sudah memenuhi persyaratan yang diminta.

Meski begitu dari total dana yang ada di Rekening Kas

Desa (RKD) itu yang sudah berhasil terserap di desa-desa penerima mencapai Rp 398.789.082.099 atau sebesar 41,3 persen. Ternyata dari monitoring dan evaluasi pihaknya kata Ismed terungkap, dari saldo yang ada di Rekening Kas Desa (RKD) uangnya sudah tidak ada lagi. Alias sudah terserap seluruhnya oleh desa-desa penerima atau sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Hanya saja laporan penggunaannya yang belum masuk, oleh semua desa pengguna. "Laporannya ini yang perlu disegeerakan, sehingga catatan yang ada masih tercekam di Rekening Kas Desa," pungkasnya. (iks)

Kapolri Tindak Tegas Kapolda yang Lakukan Kesalahan Fatal

BENGKULU - Kapolri Jenderal Idham Azis bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal. Sanksi tegas berupa pencopotan pun diberikan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dianggap telah lalai menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono Dalam konferensi pers kemarin di Mabes Polri.

Disampaikan Raden Prabowo pencopotan dilakukan sesuai dengan telegram bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 16 November tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

"Ada dua kapolda yang enggak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberi sanksi berupa pencopotan, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," ujar Argo kepada wartawan, Senin (16/11).

Untuk Nana, dimutasi menjadi Koorsahli

Kapolri. Dia digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya Kapolda Jawa Timur, lalu Irjen Rudy Sufahriadi dimutasi menjadi Widyaiswara Baharkam Polri. Posisi dia digantikan Irjen Ahmad Dofiri yang sebelumnya Aslog Kapolri.

Selain itu, Idham Azis juga memutasi Kapolda Bali Irjen Petrus Golose sebagai perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri. Sebagai penggantinya, Idham menunjuk Irjen Putu Jayan Danu Putra yang kini masih menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat. Kapolda Maluku Irjen Baharudin Djafar dimutasi menjadi Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posisinya digantikan oleh Irjen Refdi Andri yang sebelumnya Koorsahli Kapolda.

Kemudian Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta ditunjuk sebagai Kapolda Jatim menggantikan Fadil Imran. Untuk posisi yang ditinggalkan, Idham menunjuk Irjen Rikwanto yang kini masih menjabat Kapolda Maluku Utara. Untuk kekosongan posisi Kapolda Maluku Utara, Idham mempercayakan kepada Irjen Risyapudin Nursin. (rls/wij)

XXI BenMall Dibuka Kembali

Sambungan dari hal 9

Hanya yang membedakan penonton wajib menggunakan masker, dilarang berkerumun, dan saat di dalam bioskop duduknya pun sudah menerapkan jarak-jarak sehingga tidak berdekatan. Mengurangi kontak sesama penonton. Pemesanan tiket kata Wiwid menggunakan protokol kesehatan yang ketat, saat mengantar harus memberi jarak. "Untuk mudahnya kami menyarankan agar calon penonton membeli tiket secara online saja, untuk menghindari kerumunan," paparnya. Harga tiket per orang mulai dari Rp 25 ribu sampai dengan Rp 35 ribu, dan normalnya antara harga tiket per orang mulai dari Rp 25 ribu sampai dengan Rp 35 ribu, dan normalnya antara Rp 35 ribu

sampai dengan Rp 55 ribu.

Melalui pembukaan Bioskop XXI ini kata Wiwid diharapkan dapat melepas dahaga masyarakat Bengkulu yang sudah lama menunggu untuk menyaksikan film-film baik Indonesia maupun asing di gedung bioskop secara lebih nyaman, dan terjaga dari penularan Covid-19. "Mudah-mudahan dengan pembukaan ini hiburan untuk masyarakat bisa dijalankan," pungkasnya.

Sementara itu, Agus pengunjung XXI BenMall mengaku sangat senang dengan telah dibukanya kembali bioskop tersebut. Dia bersama keluarga bisa menonton di bioskop. Tentunya lebih nyaman ketimbang nonton film di hand phone atau TV di rumah. "Kita cukup menyambut antusias dengan pembukaan XXI ini," tutupnya. (iks)

PGRI Kembali Datangi Dinas Dikbud

Sambungan dari hal 9

Hasil koordinasi dengan Dikbud, sambungannya, dari yang disampaikan Plt Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Eri Yulian Hidayat ke mereka bahwa, secara kelengkapan administrasi di Dinas Dikbud sudah semua. Hanya saja tinggal lagi pencairan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu.

"Jadi kawan-kawan guru Insya Allah dalam waktu dekat ini, tunggu saja pencairannya karena tadi sudah dikonfirmasi dari dinas dikbud ke bagian keuangan," terang Asep.

Untuk diketahui, anggaran untuk pembayaran TPG ini sudah ditransfer pusat ke kas daerah. Tahap pertama untuk pencairan TPG triwulan III ini ada 2.753 guru di bawah naungan Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu sudah diajukan. Untuk pembayaran TPG karena sudah mendapatkan SK Penerima

TPG.

Meliputi guru SLB sebanyak 63 orang, guru SMA sebanyak 1.713 orang, dan guru SMK sebanyak 977 orang sudah diajukan untuk pembayaran tahap pertama oleh Operator SIM Pembayaran Dikbud Provinsi Bengkulu ke bagian keuangan dikbud. Untuk pencairan TPG triwulan III ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 31,322 miliar.

"Semuanya butuh proses, dalam 1-2 hari ini kita selesaikan semua. Tunggu saja, kita harapkan teman-teman guru dapat sabar," ujar Plt Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu Eri Yulian Hidayat saat dikonfirmasi terkait keterlambatan pembayaran TPG ini.

Terpisah, Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Noni Yuliesti memastikan bahwa sepanjang persyaratan untuk pembayaran TPG ini sudah selesai dan lengkap serta diajukan oleh Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu ke BPKD, maka pihaknya akan memprosesnya untuk pencairan. Menurut Noni, tidak ada kendala untuk pembayaran TPG karena anggarannya sudah tersedia.

"Terkait TPG ini, syaratnya duit dari pusat sudah masuk, kita cek sudah masuk. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan (SPD), sepanjang OPD mengusulkan kita keluaran. Nanti kita cek lagi," pungkas Noni. (key)

LAYANAN SMS PDAM KOTA BENGKULU. Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan. Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan. Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain "Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU. Daftar harga komoditi seperti beras, gula pasir, daging, telur, bawang, kacang, ikan, dan sayuran. PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU. Daftar harga komoditi seperti semen, pasir, batu, paku, dan lain-lain.

bank bengkulutanggung dan tumbuh. Kantor Pusat: Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu. TABUNGAN: Bank Bengkulu, Simpeda, Tabunganku. DEPOSITO: Bank Bengkulu.

Wulan Mini BERDAYA MAKSI. Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS. Tarif Iklan Rp 5.500 per baris, Minimal 3 baris, maksimal 10 baris. SUMUR BOR, JUAL TANAH.

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN Pemimpin Umum: HM MUSLIMIN (nonaktif), General Manager/Penanggung Jawab: MARSAL ABADI, Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia: MUTIA AMPERIANA, Pemimpin Perusahaan: Hj. NURBAITI, Wakil Pemimpin Perusahaan: - Pemimpin Redaksi: RIKY DWI PUTRA, Redaktur Pataksana: PATRIS MUWADI, Redaktur: SUMARLIN, HERY APRIZAL, FAZLUR RAHMANN, ADE HARYANTO, Wartawan Kota: ANUKERAN HANUJAL, YUKI KE KAPOLINA, WINDI JUNIUS, JAFRI RISMAWARANI, LHM JULIANDY, Wartawan di Daerah: PERI HARYADI (Bukomuko), ARIE SAPUTRA WJAYATA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rangas Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), Sekretaris Redaksi: ANNA MARI-YOHANA, Pracetak: SUTAMIRIN (Kabang), FRAN SINATRA, URI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNIADI, RUSDIANTO Manajer Iklan: KOMI KENDY, Account Executive (AE): WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran: MARSAL ABADI, Staf: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, Design Iklan: BOY RAHMAN HAKIM, WIRVANTO, Manajer Pemasaran: HAZRIM, Deputy: MASRIYATI, Staf Pemasaran: SULISTI HARTINE, SIRHANUDIN, SAMRIS MAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI, Manajer Keuangan: Hj. NURBAITI, Manajer Keuangan: AGUS SUWARSONO, Accounting: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, Event Organizer (EO): TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, Divisi Anak Perusahaan: SUKATNO, M FIRDAUS, JER-FRI GINTING, M GRASU, SOFYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENGI, HERY PU, MARSAL ABADI, DASPAN HARVADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRI IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA, Penerbit: PT BENGKULU SEGAFAK PERMAI, Komisaris Utama: HM ALWI HAMMU, Komisaris: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN, Direktur Utama: H SUPARNO WOTOKROMO, Direktur: HM. MUSLIMIN, HM. Cooperative Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu: Dr. Harris Arthur Hadar, SH, MH, Alamat Redaksi Pemasaran/Iklan: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P. Natadirdja No. 69 Km 6.5 Bengkulu. Telepon (0736) 20882, 22060, 341684, 344754, 346771 Faximile (0736) 346770 Perwakilan Jakarta: Graha Pena Jakarta Lantai 6 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021) 53659581 Fax (021) 53651427 Percetakan: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, Manajer Percetakan: - , Operasional Percetakan: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMELZA, HERMAN, TRICHO WILAJA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRINDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, Alamat Percetakan: Jalan Wiri Supratman RT 01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Muara Bangkulu, Kota Bengkulu. Telepon 082180191842 Tarif Iklan: Display (umum) Rp. 47.500/mmk, sosial/kelembagaan/pendidikan, film, dan upacara selamat Rp. 5.500/mmk, iklan baris/misal Rp. 5.500/baris, max 10 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4hataman) Rp. 48.000/mmk surat warna, Rp. 53.000/mmk (2 warna), dan Rp. 62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp. 6.000/eks, langganan Rp. 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154

POLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG
PILIHAN PEMBACA RB

	4	41
Teguh	Nasirwan	
	1	39
Dalhadi Umar	Wawan Fernandez	
	3	35
Kopli	Rozi	
	2	32
Armansyah	Masropen	

Minta Rekap Manual, Batal Pakai Sirekap

PELABAI - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember, batal. Menyusul hasil pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar KPU RI, Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan komisi II DPR. Intinya, disepakati penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pilkada 2020 didasarkan pada berita acara hasil penghitungan dan rekapitulasi manual.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr, SE mengaku masih menunggu instruksi lanjutan KPU RI. Dalam artian menunggu regulasi tertulis. "Kalau memang tak jadi pakai Sirekap, artinya beberapa salinan formulir harus segera disiapkan karena kembali ke sistem manual," kata Shalahuddin.

Tidak dipungkirinya, KPU RI memang sempat melakukan uji coba aplikasi Sirekap di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bahkan KPU Lebong sendiri sudah terlanjur menyosialisasikan rencana penerapan Sirekap ke seluruh partai politik (partai) dan Liaison Officer (LO) pasangan calon (paslon) Pilbup Lebong. "Yang pasti kami akan menjalankan tahapan Pilkada di Lebong ini sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan KPU RI," tukas Shalahuddin.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong, Jefriyanto, M.Pd juga memastikan Sirekap batal diterapkan dalam Pilkada 2020. Tidak hanya Lebong, itu berlaku nasional. Atas pembatalan Sirekap itu, dimintanya KPU segera menyosialisasikannya ke parpol dan LO paslon. "Setelah turun regulasinya dari pusat, segera disampaikan ke peserta Pilkada di Lebong," tegas Jefriyanto. (sca)

KORPRI IDAMAN ESTATE
Rumah Type 36 Subsidi

Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING

PROMO BULAN INI 5 JUTA TERIMA KUNCI SKB

ANGSURAN MULAI Rp. 877.741

DIDUKUNG KPR Bank BTN

Segera Hubungi...!! 0852 6791 1112
0853 8431 2727 0821 8265 4441

PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Dengan Selalu Memakai Masker Saat Keluar Rumah, Menjauhi Kerumunan, Rajin Mencuci Tangan dan Terapkan Pola Hidup Sehat Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Lebong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Pjs. Bupati Lebong H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, MM

Sekda Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si



BERUNTUNG: Pelantikan Yeni, politisi Nasdem sebagai PAW anggota DPRD.

PAW Waka I DPRD Tunggu SK Gubernur

PELABAI - Kekosongan jabatan Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kabupaten Lebong, akan segera diisi dalam waktu dekat. Teknisnya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) gubernur. Namun untuk posisi kursi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang berkrang satu di legislatif pas-camudurnya Teguh Raharjo Eko Purwoto, SE karena maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong, kemarin (16/11) telah diisi Yeni Herdianti.

Yeni yang maju dari daerah pemilihan (dapil) III itu berada di posisi ketiga suara terbanyak dengan perolehan 700 suara. Suaranya persis di bawah perolehan Teguh dan Dedi Hariyanto, rekan separtainya di dapil yang sama yang lolos duduk di legislatif.

"Untuk PAW itu kami hanya Data dihimpun, kursi Waka I DPRD Lebong berpotensi ditempati Dedi Hariyanto. Itu karena perolehan suaranya berada di peringkat kedua terbanyak untuk partainya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Terlebih Dedi juga menduduki jabatan Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Lebong.

Sementara Yeni dilantik mengisi kursi Nasdem yang kosong di DPRD Lebong sesuai Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: E/356/B1/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lebong Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Ia dilantik menjabat Sementara (Pjs) Bupati Lebong, H. Herwan Antoni, S.K.M, M.Kes, M.Si di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Lebong. (sca)

Perbaiki Dulu Jaringan Internet

LEBONG SELATAN - Banyaknya program dengan aplikasi berbasis elektronik yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos meminta Pemkab Lebong melakukan evaluasi. Dari kacamata, sejumlah aplikasi tidak berjalan maksimal karena belum didukung fasilitas memadai. "Salah satu kendalanya jaringan internet, makanya perbaiki dulu jaringan internet di Lebong," kata Mahdi.

Diakuinya, sejumlah aplikasi elektronik itu sangat menunjang asas transparansi, efektif dan efisien. Namun jika penerapannya masih banyak menemui kendala, dikhawatirkan semakin memboroskan anggaran. Dicontohkannya absensi PNS yang menggunakan sistem elektronik. "Buktinya saat ini dihentikan dulu karena sebulan diuji coba, banyak meninggalkan permasalahan," papar Mahdi.

Jika Pemkab Lebong tetap berkeinginan penuh menerapkan aplikasi elektronik, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, harus diusulkan program peningkatan jaringan internet. Khususnya pembangunan mini tower di sejumlah titik yang belum tersentuh internet. "Kalau tidak memungkinkan pihak penyedia yang membangun prasarannya, ya Pemkab Lebong yang harus menyiapkannya," tukas Mahdi.

Jika menunggu penyedia, sulit bagi Pemkab Lebong memaksimalkan program pelayanan berbasis elektronik karena ada perhitungannya. Setiap penyedia merupakan perusahaan yang memperhitungkan untung dan ruginya dalam berinvestasi di suatu daerah. Itu artinya Pemkab Lebong harus berkorban menyiapkan prasarannya. "Kalau jaringan internet masih seperti inilah, apapun aplikasi canggih yang diluncurkan tidak akan berjalan maksimal," jelas Mahdi.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Lebong, Donni Swabuana, ST, M.Si memastikan di RAPBD 2021 telah mengusulkan dana Rp 1 miliar lebih untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di sejumlah daerah yang masih blank spot. Salah satunya di Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Pinang Belapis. "Jika diakomodir, mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi daerah yang blank spot jaringan internet," tandas Donni. (sca)



DONI

Lebong Tertinggi Money Politics

PELABAI - Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong, Melki Agustian, SH mengaku sulit menghilangkan praktik money politics atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Soalnya Kabupaten Lebong termasuk kabupaten dengan praktik politik uang tertinggi se Provinsi Bengkulu. "Namun perlu dipahami, sulit bukan berarti tidak bisa," tukasnya.

Untuk menekan politik uang dalam Pilkada 9 Desember, KPU akan menggiatkan sosialisasi anti politik uang ke masyarakat. Materi yang paling dikependakan adalah dampak dari politik uang yang ancamannya pidana. Pidana itu tidak hanya dijatuhkan kepada pemberi seperti Pemilu selama ini, namun juga dijatuhkan kepada penerima. "Kalau tidak mau masuk penjara jangan coba-coba memberi atau menerima politik uang," tegas Melki.

Ancaman itu diatur dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pasal itu disebutkan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilihnya kepada calon tertentu. "Masyarakat harus tahu sanksi ini supaya tidak terjerat," ungkap Melki.

Jika sudah diberitahu, namun masih berani juga memberi atau menerima politik uang, versi Melki, Bawaslu tidak akan pandangbulu memprosesnya. Tugas sosialisasi bahaya politik uang itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Namun menjadi tanggung jawab pemerintah beserta partai politik selaku wadah pendidikan politik dan seluruh masyarakat. "Dari sekarang masyarakat harus memposisikan diri menjadi pemilih yang cerdas, jangan mau suaranya ditukar rupiah," ungkap Melki.

Pantauan RB, ancaman pidana bagi penerima politik uang itu belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menempatkan pilihannya tergantung dengan nilai rupiah yang ditawarkan masing-masing pasangan calon (paslon) peserta Pilkada. Tak peduli sebagai apapun visi dan misi peserta, posisi uang tetap teratas dalam mempengaruhi selera pilih masyarakat. "Mau sanak atau tetangga, kalau tidak mengeluarkan uang, sulit bisa menang di Lebong," ujar tokoh masyarakat Lebong, Suharudin. (sca)

Yayasan/LPK Mirai Nusantara Cabang Bengkulu
Izin Kemenakerstrans RI, Keputusan DIRJEN BINA LATTAS
NOMOR KEP. 54/LATTAS/II/2018
Alamat: Gang Pari IV RT 03 RW 02 No 125 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Menerima Siswa/I Program Magang ke Jepang
Dengan Syarat:
Fotocopy KTP
Fotocopy Akte Lahir
Ijazah SMA / SMK/MA/Sederajat (Legalisir)
Pas photo warna 4x6 enam lembar
Mengisi Formulir Pendaftaran
Izin Orang Tua/Wali
Membayar Biaya Pendidikan

Informasi lebih lanjut hubungi:
081373802011 (Anggina)
082289661989 (Hadyon Saputra)
082289334283 (Asep Supriyanta)
085268244054 (Hafidz)
082284289736 (Hasmartito)

LPK Mirai Nusantara Cabang Bengkulu merupakan satu-satunya LPK di Bengkulu yang berstatus SO (Sender Organizer) Lembaga Penyelenggara Pendidikan sekaligus Pemberangkatan Magang Ke Jepang. Kantor Pusat di Jl Raya Cikuda No 332 Jatininggar Kabupaten Sumedang Jawa Barat berdiri sejak tahun 2001.

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE
Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II
Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE
Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Miliki Segera Perumahan Subsidi:

BENTIRING PERMAI III
Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring

PEMATANG PERMAI
Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur

SURABAYA PERMAI V
Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebakul Kel. Surabaya

KPR Bisa Melalui Bank **BTN**

Hubungi: **PT. AHSANI KARYA**
Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu
Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405


POLING

CABUP DAN CAWABUP


MUKOMUKO

PILIHAN PEMBACA

59




SAPUAN

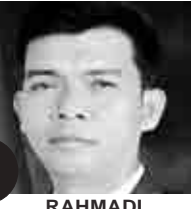


WASRI

50



CHOIRUL HUDA



RAHMADI



PRESENTASI: Di hadapan Plt Bupati Mukomuko, Manajemen PT. Mukomuko Agroindustries Terminal memaparkan rencana pembangunan pelabuhan di Mukomuko.

Dapat Izin 2012, PT. MAT Baru Muncul

Bangun Pelabuhan Pengapalan CPO

MUKOMUKO - Entah kemana perusahaan ini sejak usai mendapatkan izin tahun 2012 lalu. Adalah PT. Mukomuko Agroindustries Terminal (PT. MAT). Setelah delapan tahun memegang izin dari Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan khusus pengapalan CPO. Dan setelah 9 tahun mendapatkan rekomendasi dari Bupati Mukomuko saat itu Ichwan Yunus, baru ini perusahaan itu muncul lagi melakukan pemamparan.

Pemamparan serupa pernah dilakukan sebagaimana diakui Direktur PT. MAT, Ir. Hulman Gagarin Panjaitan. "Sebelumnya kami sudah persentasikan juga rencana ini kepada pihak pabrik CPO di daerah ini. Mereka setuju dan sangat mendukung pembangunan pelabuhan," ujarnya.

Pemamparan digelar di ruang kerja Plt Bupati Mukomuko, Haidir, S.I.P. Hadir sejumlah petinggi perusahaan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) di Mukomuko dan sejumlah pejabat terkait Pemkab Mukomuko.

Hulman memaparkan pembangunan pelabuhan khusus pengapalan Crude Palm Oil (CPO) sudah lama direncanakan. Pada 2011 lalu, pihaknya sudah membeli lahan seluas 14 hektare di Kecamatan Teramang Jaya sebagai lokasi pelabuhan. Bahkan lahan tersebut sudah dilakukan pematangan. "Kalau mulai pembangunannya kita rencanakan Maret 2021. Target kita, selama 24 bulan setelah itu pelabuhan sudah mulai beroperasi," katanya.

Menurutnya, dengan adanya pelabuhan khusus CPO di Mukomuko, akan mampu mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Selain itu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk juga mendongkrak harga CPO di pabrik.

Selain itu, dengan adanya pelabuhan ini nanti, maka perusahaan CPO di Mukomuko bisa menekan biaya transportasi yang selama harus dikeluarkan. "Imbasnya, pihak pabrik bisa menaikkan harga beli sawit dari masyarakat. Efeknya luas bagi masyarakat, pemerintah dan perusahaan pabrik CPO yang ada di Mukomuko saat ini," paparnya.

Ia menyebutkan pembangunan yang mereka rencanakan berkonsep pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dimana dalam lahan yang telah tersedia,

selain dibangun pelabuhan, juga dibangun pabrik biodiesel, pembangkit listrik dan pabrik CPO.

"Jadi cukup kompleks, yang semuanya akan menimbulkan multiplayer effect bagi masyarakat, pengusaha maupun daerah," pungkasnya.

Plt Bupati Mukomuko Haidir, S.I.P menyambut baik rencana tersebut. Ia berharap secepatnya direalisasikan mengingat investasi yang bakal masuk ini diyakini berimbas baik bagi daerah dan masyarakat.

"Kita mendukung rencana ini. Kaitannya dengan dokumen data, akan kita bantu. Kemudian nanti perizinan akan kita proses sesuai peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya Mukomuko terbuka bagi investor yang berniat baik ikut membangun daerah kita ini," kata Haidir.

Dikatakan Haidir, masyarakat Mukomuko telah lama menanti adanya pelabuhan khusus CPO. Dengan adanya niat PT. MAT membangun pelabuhan di Mukomuko, akan menjadi harapan baru bagi masyarakat Mukomuko.

"Sebagai gambaran, perkebunan sawit terbesar di Provinsi Bengkulu ada di Kabupaten Mukomuko. Termasuk pabrik CPO terbanyak, juga di Mukomuko. Pemda menyambut baik langkah PT. MAT ini, mendukung sepenuhnya," demikian Haidir. (hue)

LINTAS

Tersisa 260 Balita di Bawah Garis Merah

MUKOMUKO - Penurunan angka balita dengan berat badan (BB) dibawah garis merah, terbilang tinggi. Dari sebelumnya terdapat 483 balita dengan kategori tersebut. Kini, jumlahnya sebanyak 260 balita. "Tahun ini ada 260 balita masuk kategori berat badan di bawah garis merah. Jumlah ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Mukomuko, Oyon Kanedi.

Upaya pencegahan stunting (kekerdilan) pada anak bayi dibawah usia lima tahun ini masih terus dilaksanakan. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). "Untuk melaksanakan program ini, kita didanai dari dana alokasi khusus (DAK)," kata Oyon.

Selain penyuluhan juga dilakukan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang tersebar di 148 desa dan tiga kelurahan. Pasalnya petugas kesehatan telah mengaktifkan kembali posyandu yang tersebar di seluruh desa untuk memberikan pelayanan kesehatan. Termasuk pemberian makan tambahan kepada balita. "Sebelum ditetapkan new normal, petugas medis yang mendatangi warga atau door to door untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan makan tambahan kepada balita," sampai Oyon.

Sekarang, setiap bulan masyarakat mendatangi posyandu yang berada di wilayahnya. Guna mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapatkan makan tambahan balita. "Berkurangnya jumlah balita dengan berat badan di bawah garis merah tak lepas gencarnya penyuluhan dan pemberian makanan tambahan," tukasnya. (hue)

Sulit Pasarkan Hasil Pokdakan

MUKOMUKO - Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan Mukomuko Asbaz Novyan, S.Pi, MM menyebut masyarakat masih sulit memasarkan produk hasil kelompok budidaya perikanan (Pokdakan). Sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan mengembangkan pokdakan.

Selain itu kata Asbaz, harga pakan ikan yang mahal turut menambah sulitnya pengembangan produk ini. "Itu yang menjadi keluhan pokdakan di Kabupaten Mukomuko," sampainya.

Masyarakat lanjut Asbaz, menjual hasil panen ikan hanya dengan cara diecer. Ini karena tidak ada toko atau tempat khusus yang menampung hasil panen ikan milik kelompok. "Jadi wajar saja kalau masyarakat di Kabupaten Mukomuko enggan mengembangkan budidaya perikanan air tawar," sebutnya.

Jika di Kabupaten Mukomuko ada pengusaha yang mau menampung hasil panen ikan, dipastikan masyarakat akan semangat mengembangkan budidaya perikanan air tawar. Baik nila, lele, gurami, patin dan jenis ikan air tawar lainnya.

Sebab, jelas Asbaz, hasil budidaya perikanan yang sebagian masih digeluti masyarakat memiliki potensi yang sangat menjanjikan. "Hasilnya itu lumayan bagus untuk peningkatan ekonomi. Tapi ya itu tadi masalahnya, mereka kesulitan menjual hasil panen dalam skala besar. Kalau pun ada yang mau beli, paling skala kecil. Itulah yang membuat petani pembudidaya ikan air tawar malas," terangnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Mukomuko supaya keluhan petani pembudidaya ikan air tawar mendapatkan solusi yang baik. Misalnya, bisa saja melibatkan BUMD selaku pengepul atau pengolah hasil budidaya ikan air tawar.

Termasuk BUMD itu diharapkan dapat menampung hasil tangkapan ikan milik nelayan. Atau bisa saja Pemkab Mukomuko melakukan kerja sama dengan pihak pengusaha di daerah ini maupun di luar Kabupaten Mukomuko. "Insya Allah, kalau Pemkab Mukomuko bisa mengakomodir keluhan petani perikanan dan nelayan maka perekonomian mereka akan bersaing dengan petani sawah dan pekebunan. Kami sangat berharap di tahun 2021 mendatang sudah ada titik terangnya," sebutnya. (hue)



PARIPURNA: DPRD Mukomuko menyepakati Propem Perda untuk Tahun 2021 mendatang, dalam rapat paripurna, kemarin.

Hanya Disepakati 9 Raperda

MUKOMUKO - Pemkab dan DPRD Mukomuko menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas dan disahkan tahun depan. Ini dikemuka Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Mukomuko, Busra.

Kesepakatan itu pun disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Mukomuko kemarin (16/11). "Dari 9 raperda itu, satu merupakan raperda usulan dari Bapemperda DPRD Mukomuko. Yakni Raperda tentang Adat Istiadat," kata Busra.

Awalnya kata Busra, Pemkab Mukomuko hanya mengajukan 7 raperda. Namun saat pembahasan di Bapemperda DPRD, Pemkab Mukomuko menambah satu raperda lagi. Yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. "Awalnya dari Pemda 7 raperda, dari kita 1 raperda. Setelah dibahas, Pemda menambah 1 raperda lagi makanya jadi 9 Raperda," kata Busra.

Dari 9 raperda tersebut, dibagi dalam tiga masa sidang. Khusus pada masa sidang pertama DPRD Mukomuko ditarget hanya membahas dan mengesahkan

2 raperda. Yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 13 tahun 2006, tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa. Lalu Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 tahun 2015, tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan di masa sidang II, 6 perda ditarget dibahas. Terdiri Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026. Lalu Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Selanjutnya, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2018-2025. Berikutnya Raperda tentang Adat Istiadat, Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 dan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

"Baru di masa sidang III, menyisakan satu raperda lagi, yakni khusus membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020," sampai Busra.

Ia membantah jika sejumlah raperda yang dimasukkan untuk dibahas tahun depan hanya sebagai penambah kegiatan. Dinyatakan Busra, raperda yang disepakati diprogramkan tahun 2021 itu sudah dikaji pihaknya secara seksama. Bahwa sejumlah raperda itu memang dibutuhkan untuk kabupaten dan masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Mukomuko M. Ali Saftaini, SE. Hadir Sekda Mukomuko Drs. H. Marjohan sejumlah pejabat eselon II. Juga hadir Dandim 0428 Letkol. Inf. YM. Teguh Edi Pamungkas, Wakapolres Mukomuko Kompol. Edy Susanto, S.Sos, Ketua PN Mukomuko Dr. Nur Kholis, SH, MH. (hue)

Silpa DD Rp 3 Miliar, Dilaporkan Rp 0

MUKOMUKO - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Dana Desa (DD) dilaporkan Rp 0. Padahal hampir setiap tahunnya, silpa DD Kabupaten Mukomuko mencapai Rp 3 miliar lebih.



GIANTO

Dikonfirmasi mengenai itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mukomuko, Gianto, SH, M.Si mengatakan, pihaknya sudah melakukan rekonsiliasi terkait silpa DD tersebut. Setelah dilakukan pelacakan, silpa DD untuk Kabupaten Mukomuko dipastikan tanpa sisa di Rekening Kas Desa (RKD). "Rekon silpa khusus DD ini kita laksanakan untuk melakukan penyesuaian atau penyalangan terhadap silpa dari DD yang diberikan pemerintah pusat sampai tahun 2019," kata Gianto.

Mengenai setiap tahun silpa DD bisa mencapai sekitar Rp 3 miliar, tak dibantahnya. Hanya saja silpa DD di setiap tahun anggaran itu sudah langsung dialokasikan penggunaannya oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, 148 desa di Kabupaten Mukomuko sampai tahun anggaran 2019 tidak memiliki silpa DD.

"Perdesa ada silpa antara Rp 5 juta sampai Rp 15 juta. Bila ditotal seluruh desa di Kabupaten Mukomuko, didapati angka silpa mencapai Rp 3 miliar lebih. Tapi setelah dilacak ke desa, silpa itu digunakan di APBDes perubahan tahun anggaran berikutnya," terangnya.

Dengan begitu, otomatis 148 desa di Mukomuko tidak satupun yang dikenai kewajiban mengembalikan silpa DD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). "Sudah dipastikan tidak ada silpa

DD yang disetor ke RKUD. Karena semuanya sudah digunakan pada tahun anggaran berikutnya," pungkaskan Gianto.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko, Rusli Zulfiah menyatakan pemerintah desa harus segera menyetorkan ke RKUD Pemkab Mukomuko jika terdapat silpa DD. Yakni silpa DD dari TA 2015 hingga silpa DD TA 2019.

Setelah itu, Pemkab Mukomuko dalam hal ini bupati Mukomuko harus menyetorkan silpa DD dari 148 desa se-Kabupaten Mukomuko ke Kementerian Keuangan. Dana tersebut harus disetorkan Pemkab Mukomuko dari RKUD ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pemkab diberikan waktu paling lambat 31 Desember 2020.

"Harus ada tindak lanjut setelah silpa DD dari RKD ke RKUD Pemkab Mukomuko. Yakni silpa DD itu harus ditransferkan dari RKUD Pemkab Mukomuko ke RKUN, paling lambat akhir bulan Desember 2020," kata Rusli.

Tentunya sebelum silpa DD dari RKD ke RKUD ditransfer ke RKUN, Pemkab Mukomuko terlebih dahulu harus menggelar rapat rekonsiliasi. Paling lambat akhir November. Rekonsiliasi untuk memastikan kecocokan silpa DD hasil penghitungan Pemkab, dengan silpa DD hasil penghitungan masing-masing pemerintah desa. (hue)

DAIHATSU OKTOBER CERIA

SIGRA 1000	DP 8 Juta
SIGRA 1200	DP 9.8 Juta
AYLA 1000	DP 2 Jutaan
AYLA 1200	DP 7 Jutaan
XENIA	DP 15 Juta
GRANDMAX	DP 18,5 Juta
TERIOS	DP 28 Juta

Proses aman dan Minyak FULL

Hub. YAZID Hp/ WA: 0852 6989 4916

PROMO AKHIR TAHUN 2020 Agung TOYOTA

AGUNG TOYOTA BENGKULU

Agya	Dp 27 Jutaan
Calya	Dp 17 Jutaan
Avanza	Dp 24 Jutaan
Veloz	Dp 33 Jutaan
Rush	Dp 58 Jutaan
Yaris	Dp 65 Jutaan
Innova	Dp 83 Jutaan
Corolla Cross	Dp 120 Jutaan
Fortuner	Dp 110 Jutaan

Info Pemesanan Toyota Hubungi Marketing: **AFNI AL MUCHLISIN** HP: 0823 7176 2728 - WA: 0853 6765 0885

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Hicis, Alai
CURUP - 39153

**Rekap Daftar Harga Bahan Pokok
Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup**

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Putih	6.000	11. Sewi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

**POLING CABUP DAN
CAWABUP RL PILIHAN
PEMBAWA RB**

2

62

**Hj. Susilawati, SE, MM
H. Ruswan YS, S.Sos, M.Si**

1

16

**Dr. H. M. Fauzi, SE, MM, MCOO
Fatriani, SE**

4

15

**M. Fikri Thohari, SE
Yusuf Samudri, S.Pd**

3

13

**Syamsul Ellendri, SE, MM
Hendra Wahyudiningsih, SN**



DILANTIK : Anggota PTPS yang terpilih di seluruh wilayah kecamatan, kemarin dilantik oleh PPK masing-masing.

Seluruh Anggota PTPS Dilantik

CURUP - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rejang Lebong (RL) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan pelantikan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) diseluruh wilayah kecamatan. Total keseluruhan anggota PTPS yang dilantik PPK wilayah masing-masing mencapai 576 orang.

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kabupaten RL Dodi Hendra Supiarso, SE kemarin kepada RB, pelantikan dilakukan satu hari secara bertahap di masing-masing wilayah kecamatan. "Ya, hari ini seluruh anggota PTPS dilantik oleh masing-masing PPK. Mudah-mudahan seluruhnya selesai hari ini dengan tetap mematuhi Prokes (protokol kesehatan, red)," terang Dodi.

Dilanjutkan Dodi, anggota PTPS memiliki masa kerja selama lebih kurang satu bulan. Mulai 28 hari sebelum kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Hingga 7 hari setelah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. "Untuk masa kerjanya lebih kurang satu bulan," terang Dodi.

Ditambahkan Dodi, dirinya berpesan agar seluruh anggota PTPS bisa melaksanakan kerja mereka nantinya secara profesional dan selalu mematuhi prokes. "Serta megedepankan profesionalitas dan netralitas dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Karena menjaga netralitas bagi penyelenggara pemilu adalah wajib hukumnya," pesan Dodi. (dtk)

**PROMO PALING MURAH
DISKON PALING BESAR** Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4Jt
Innova Angsuran 5,6Jt
Fortuner Angsuran 8,5Jt

Promo Paling Murah | Discon Paling Besar | Buruan Hanya dibulan ini!

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertaruh Hadiah

Minat...?? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS



ARAHAN : Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si saat menyampaikan arahan kepada Polres RL dan jajaran.

Kapolda Kunker ke Polres RL

Tekankan Upaya Ekstra Pencegahan Covid-19

CURUP - Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si kemarin melakukan kunjungan kerja ke Polres Rejang Lebong (RL) dengan didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Bengkulu. Rombongan disambut Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH beserta PJU Polres RL dengan

mengedepankan protokol kesehatan (prokes).

Dalam arahnya, jenderal bintang dua ini meminta bintang dua ini meminta Kapolres RL dan jajarannya untuk melakukan upaya ekstra pencegahan Covid-19. Apalagi Kabupaten RL dalam Zona Merah. "Seluruh Polres Rejang Lebong dan jajaran saya minta untuk berupaya

ekstra dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, terutama untuk mencegah kluster baru di Polres Rejang Lebong," sampai Kapolda.

Untuk itulah, sambung Kapolda, seluruh personel diminta selalu menjaga kesehatan, terutama dalam pelaksanaan tugas. Tegakan kedisiplinan protokol kes-

ehatan (prokes), utamanya di lingkungan kerja Polres RL, termasuk melaksanakan tugas di lapangan. "Jaga kesehatan dan selalu disiplin prokes paling utama agar terhindar dari Covid-19," pesan Kapolda.

Di sisi lain terkait pilkada, Kapolda juga mengingatkan seluruh jajarannya, termasuk

Polres RL untuk selalu menjaga netralitas melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Serta menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. "Saya tegaskan agar seluruh anggota Polri wajib dan harus selalu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada," tegas Kapolda. (dtk)

Cerita Kepala Bappeda RL Positif Covid-19

Lima Kali Rapid Test Non Reaktif, Minum Paracetamol

Jumat (13/11) lalu menjadi salah satu catatan sejarah dalam hidup Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong (RL) Dr. H. Asli Samin. Karena hari ini hasil Swab Test yang dilakukan menunjukkan bahwa dirinya terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal kondisinya kesehatannya sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang setelah beberapa hari sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Curup. Berikut laporannya.



WANDA PEBRIANDA, Rejang Lebong

KELUAR: Beginilah kondisi Kepala Bappeda RL Dr. H. Asli Samin saat baru keluar dari rumah sakit karena kondisinya mulai membaik. Namun ternyata hasil swab malah menyatakan dirinya terkonfirmasi positif Covid-19.

VIRUS Corona ada dimana-mana. Itulah yang salah satu perkataan yang diungkapkan Asli Samin saat dikonfirmasi RB kemarin. "Kita akan menjalani pengalaman yang berbeda untuk menemukan musuh yang sama tentang keberadaan Corona itu di mana. Karena kita tidak tahu kapan dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan datangnya dari mana," ucap Asli mengawali ceritanya.

Dimulai dari 7 Oktober 2020, sambung Asli, dirinya merasakan begitu turunnya daya tahan tubuhnya. Sadar dengan kondisi tersebut, dirinya langsung memeriksakan diri ke rumah sakit yang selanjutnya dokter melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik dan mengambil sample darah untuk dilakukan pemeriksaan Darah Rutin, Kimia Darah, Widal Test dan Immunoserologi (Anti SARS-COV-12 IgG IgM).

"Kesimpulan waktu itu, tidak semuanya menunjukkan hasil normal, maklum di usia saya yang sudah 51 tahun ini tentu banyak faktor penyumbang yang membuat keseimbangan elektrolit darah saya tidak normal. Tapi yang menjadi fokus perhatian saya saat itu adalah rapid test alhamdulillah non reaktif dan saya masih merasa aman dari Covid-19," ungkap Asli.

Hanya saja, lanjut Asli, 2 November 2020 kondisi tubuhnya kembali menurun dengan disertai berbagai gejala seperti badan terasa dingin menggigil, otot dan tulang terasa nyeri. Serta nafsu makan mulai menurun, air ludah terasa pahit tapi semua gejala itu segera redah setelah

minum Paracetamol 1 tablet. "Pada hari berikutnya gejala serupa datang kembali dan langsung diambil sampel darah untuk diperiksa. Namun tetap hasilnya tidak berbeda dari hasil pemeriksaan bulan yang lalu (rapid test non reaktif)," lanjut Asli.

Begitupun hari selanjutnya, Asli meneruskan cerita, gejala serupa datang menyerang lagi dan akhirnya merasa tidak sanggup lagi untuk melawan dengan berbagai teknik distraction yang pada akhirnya kondisi tetap tidak memperbaiki keadaan. Sehingga pada akhirnya dirinya harus dipasangi infus di rumah selama 2 hari berturut-turut dengan mengikuti rekomendasi pengobatan dari dokter. "Selama perawatan di rumah, sampel darah setiap hari diperiksa untuk melihat perkembangan penyakit tetapi rapid test selalu menunjukkan non reaktif," kata Asli melanjutkan ceritanya.

Lebih lanjut Asli mengungkapkan, 7 November 2020 dirinya berkonsultasi dengan dokter yang merawat dan hari itu juga diputuskan agar dirinya dirawat di Rumah Sakit. Sejak itu kondisi fisiknya terkontrol, karena dokter selalu merespon berbagai keluhan yang dirasakan. Serta setiap hari sampel darah selalu diperiksa salah satunya untuk keperluan rapid test yang hasilnya tetap non reaktif. Bila dihitung sudah lima kali rapid test. Hasilnya non reaktif.

"Bahkan sampai pada hari ke empat kondisi fisik saya sudah mulai membaik dan keluhan sudah berkurang dan dokter menyarankan istirahat di rumah," sampai Asli.

Hanya saja, terang Asli, sebelum keluar dari rumah sakit dirinya berinisiatif untuk rontgen dada sebelum. Sehingga dilakukan rontgen dada yang hasilnya ternyata hasilnya cukup mengejutkan, karena dokter ahli paru menyarankan agar harus segera swab tes. Dengan rasa penasaran yang tinggi dirinya pun pagi-pagi sudah datang ke tempat pengambilan SWAB dan hingga akhirnya hasil keluar dengan dinyatakan bahwa dirinya terkonfirmasi positif Covid-19.

"Sekarang saya sudah menjadi pasien yang ke sekian puluh ribu di Indonesia ini menderita kasus pandemi Covid-19. Belum tahu perkembangan berikutnya apakah istri, anak dan cucu serta kerabat-tersebut juga menerima penularan dari saya. Karena mereka baru kemarin dilakukan SWAB, semoga semuanya baik-baik saja. Dan saya berharap seluruh masyarakat juga harus lebih waspada agar jangan sampai jadi kasus selanjutnya," demikian Asli (**)

Segera Siapkan Lelang Dana Rehab Rekon

CURUP - Untuk memaksimalkan kegiatan di tahun 2021 mendatang khususnya dari bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Bada Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong (RL) akan mempercepat pengajuan proses lelang. Saat ini mereka sedang mempersiapkan pengajuan proses pelelangan.

Dijelaskan Kepala BPBD Kabupaten RL M. Budianto, ST dana hibah yang mencapai Rp 7,6 miliar tersebut, didapat dari usulan yang diajukan untuk penanggulangan bencana tahun 2019 lalu. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan akan mulai dilaksanakan tahun 2020 ini dengan diawali kegiatan perencanaan.

"Kita awali tahun ini

menuntas kegiatan perencanaannya terlebih dahulu dan awal tahun baru mulai kita kejar kegiatan fisik. Kita mengusulkan dana bantuan tersebut sebesar Rp 8 miliar lebih dan disetujui lebih kurang Rp 7,6 miliar untuk kegiatan rehab dan rekon yang dananya sudah masuk ke kas daerah," terang Budi.

Dijelaskan Budi, dana tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi enam titik lokasi yang sempat terkena dampak bencana alam tahun 2019 lalu. Baik itu untuk pelapis tebing maupun jembatan. "Salah satu titik yaitu jembatan yang menghubungkan Desa Lubuk Ubar Kecamatan Curup Selatan dan Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara yang putus akibat bencana alam tahun 2019," demikian Budi. (dtk)



JARAK JAUH: Pelaksanaan kerja kantor di Bappeda Kabupaten RL sejak kemarin dilakukan full jarak jauh setelah Kepala Bappeda Kabupaten RL Dr. Asli Samin dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Bappeda RL Kegiatan Jarak Jauh

Kepala Bappeda Positif Covid-19

CURUP - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong Dr. H. Asli Samin minggu lalu sempat menjalani perawatan di RSUD Curup. Tepatnya Jumat (13/11) lalu setelah kondisi membaik, namun swab test yang dilakukannya ternyata hasilnya positif Covid-19.

Untuk itulah terhitung kemarin, seluruh kegiatan kantor di Bappeda Kabupaten RL dilakukan secara jarak jauh atau melalui media daring dan aplikasi WhatsApp. Sebelumnya memang diketahui aktivitas perkantoran Bappeda Kabupaten RL sudah dilaksanakan 50 persen di kantor dan 50 persen melalui jarak jauh.

"Benar, hasil swab saya Jumat lalu dinyatakan positif dan seluruh aktivitas perkantoran saat ini dilakukan dengan sistem jarak jauh seratus persen. Karena sebelumnya kita gunakan sistem

50 persen di kantor dan 50 persen jarak jauh. Saat ini kondisi saya alhamdulillah sudah mulai membaik dan masih isolasi mandiri di rumah," terang Asli yang dikonfirmasi via telephone kemarin.

Selain itu, sambung Asli, beberapa jajarannya yang sempat kontak langsung dengan dirinya sudah dilakukan swab test dan menunggu hasilnya lagi. Jajarannya sempat kontak langsung saat melakukan urusan administrasi dan lainnya sehingga mau tidak mau langsung tatap muka dan bertemu langsung.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak menganggap enteng virus ini. Karena kita tidak tahu kapan dia masuk ke tubuh kita dan lewat siapa yang membawanya. Untuk itulah saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk benar-benar disiplin dalam protokol kesehatan, terutama saat berada dan beraktivitas di luar rumah," demikian Asli. (dtk)

POLING CABUP DAN CAWABUP KEPAHIANG PILIHAN PEMBACA RB



2

130

Hidayatullah Sjahid H. Zurdinata, S.IP



1

25

Ujang Syarifudin Firdaus Djaelani

TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020



01 26 September - 5 Desember 2020
Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyusunan Bahan Kampanye Kepada umum, Pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain

02 26 September - 5 Desember 2020
Debat Publik/ Terbuka antar Pasangan Calon

03 22 November - 5 Desember 2020
Kampanye Melalui media masa, cetak dan elektronik

04 6 Desember - 8 Desember 2020
Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

Laporan Awal Dana Kampanye
Penyerahan : 25 September 2020
Pengumuman : 26 September 2020

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Penyerahan : 31 Oktober 2020
Pengumuman : 1 November 2020

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Penyerahan : 6 Desember 2020
Penyerahan Kepada KAP : 7 Desember 2020

Masa Audit : 7 Desember - 21 Desember 2020
Penyampaian KAP ke KPU Kab. Kepahiang : 7 Desember 2020
Penyampaian KPU ke Paslon : 23 - 25 Desember 2020
Pengumuman Hasil Audit : 23 - 25 Desember

LADK LPPDK LPSDK AUDIT DANA KAMPANYE

KPU Kabupaten Kepahiang | KPU Kepahiang | KPU Kepahiang | KPU Kepahiang | @kpkuph656638@gmail.com | www.kpu-kepahiangkab.go.id

KAMPANYE PILKADA 2020

Jangan menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba!

AYO...! AWASI & LAPORKAN

Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Larangan

- Kampanye di luar jadwal
- Menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba
- Merusak & menghilangkan alat peraga kampanye
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, paslon
- Mempersoakan dasar negara, Pancasila, UUD 1945 & NKRI
- Menggunakan fasilitas & anggaran pemerintah
- Mencetak & menyebarkan bahan kampanye di luar ketentuan
- Menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi pemilih
- Menganjurkan hingga menggunakan ancaman & kekerasan
- Kampanye di tempat ibadah & pendidikan
- Memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye
- Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing/ tidak jelas identitasnya
- Mencetak & memasang alat peraga kampanye di luar ketentuan
- Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih

9 DESEMBER 2020

Feedback RSUD Jalur Dua Belum Jelas

Zamzami: Masih Dalam Pembahasan

KEPAHIANG - Kendati sudah penandatanganan draft perjanjian kerja sama pemanfaatan RSUD Curup di Jalur Dua Desa Durian Depun Kecamatan Merigi antara Pemkab Rejang Lebong (RL) dan Pemkab Kepahiang, namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Terutama terkait feedback

dari pengelolaan RSUD tersebut untuk Kabupaten Kepahiang. Tampak dari masih alotnya pembahasan terkait pengelolaan RSUD milik Pemkab RL tersebut dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang. Beberapa sektor yang diharapkan bisa memberikan keuntungan pendapatan untuk Kabupaten Kepahiang, hingga saat ini belum jelas seperti apa keputusannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Zamzami Zubir, SE, MM ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini masih dalam pembahasan antara Pemkab Kepahiang dengan Pemkab RL. Ia mengatakan pemanfaatan tersebut akan terbagi menjadi beberapa sektor, sesuai dengan OPD yang menaunginya di Pemkab Kepahiang. "Seperti untuk pendataan retribusi parkir, Pemkab RL akan

langsung melakukan pembahasan dengan Dishub Kabupaten Kepahiang. Begitu juga soal pengelolaan sampah dan limbahnya, Pemkab RL akan berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Kepahiang. Serta hal lainnya terkait feedback untuk Kabupaten Kepahiang. Memang saat ini belum ada keputusan dan penandatanganan apapun mengenai hal itu," jelas Zamzami. Sebelumnya Pemkab Kepahiang

sudah menginstruksikan kepada tiga OPD untuk melakukan penyusunan draft perjanjian kerja sama dengan Pemkab RL. Belum diketahui pasti apakah sejauh ini draft tersebut sudah disusun atau belum. Sekda mengaku belum mendapatkan laporan. Dalam proses lanjutan untuk pembahasan perjanjian kerja sama, kata Sekda akan lebih dulu akan menuntaskan izin seluruhnya RSUD Jalur Dua.

Kalaulah seluruh izin tuntas 100 persen barulah nantinya akan dilakukan pembahasan kerja sama. Tapi hendaknya 3 OPD dalam Kabupaten Kepahiang sudah menyusun draf lebih awal, sehingga tinggal melakukan pembahasan. "Kita tunggu dulu seluruh proses perizinan tuntas, barulah akan dilakukan rapat lanjutan untuk pembahasan perjanjian kerja sama ini," pungkasnya. (sly)

13 Warga Gagal Magang ke Jepang

KEPAHIANG - Harapan 13 warga Kabupaten Kepahiang yang dinyatakan lulus untuk mengikuti program magang ke Jepang pupus sudah. Pasalnya Pemkab Kepahiang memastikan untuk tahun 2021 mendatang, program magang ke Jepang dihentikan. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Kepahiang, Emalia Kontesia, S.Hut mengatakan dihentikannya program tersebut karena dalam rencana APBD 2021 pihaknya tidak mengusulkan anggaran untuk program serupa.

"Untuk saat ini kita menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi terkait program magang ke Jepang. Kita masih ada 13 orang yang belum bisa diberangkatkan, namun sampai saat ini semuanya belum bisa kita konfirmasi, bahkan keberadaannya pun belum diketahui," jelas Emalia.

Sebelumnya dalam perekrutan calon peserta magang ke Jepang dilakukan pada Juni lalu. Lanjutan wabah pandemi Covid-19 maka keberangkatan peserta ditunda. Adapun program magang ke Jepang ini merupakan program pemerintah provinsi, namun untuk tahapan rekrutmen dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

"Kita tunggu saja seperti apa kebijakan Pemerintah Provinsi, khususnya terhadap 13 orang warga kita yang lulus untuk berangkat magang tersebut. Sementara untuk kita sendiri, tahun depan berat rasanya kembali mengusulkan program tersebut di tengah kondisi anggaran daerah yang minim seperti saat ini," punga Emalia. (sly)



PANSUS: Ketua Pansus Raperda RP3KP, Hendri, A.Md (kanan) saat memimpin rapat pembahasan raperda, kemarin (16/11).

Butuh Perbaikan Naskah Akademik

Pembahasan Pansus RP3KP

KEPAHIANG - Dipenghujung tahun anggaran 2020, DPRD Kabupaten Kepahiang mengejar penuntasan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040. Bahkan kemarin (16/11) Panitia

Khusus (Pansus) Raperda RP3KP telah melakukan pembahasan mengenai payung hukum tersebut. Hanya saja dalam pembahasan tersebut pansus belum bisa berbuat banyak untuk melangkah ke tahapan lebih lanjut, lantaran masih membutuhkan perbaikan naskah akademik dan kajian terkait peraturan perundangan guna memperkuat raperda yang diusulkan eksekutif tersebut.

Disampaikan ketua pansus Hendri, A.Md bahwa pada rapat kerja hari ini masih dibutuhkan perbaikan pada naskah akademik dan kajian terhadap keterkaitan dengan peraturan perundangan lainnya dalam rangka penguatan pembahasan raperda RP3KP. "Pada rapat kerja hari ini kita masih membutuhkan perbaikan pada naskah akademik dan kajian terhadap keterkaitan peraturan perundangan

lainnya. Untuk itu kita sudah meminta OPD pengusul dalam hal ini Bappeda untuk melakukan perbaikan kembali sebelum melanjutkan pembahasan Raperda RP3KP," sampai Hendri.

Setelah dilakukan perbaikan dan kelengkapan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan raperda, akan kembali dilakukan pembahasan secara maraton. Karena raperda ini dinilai penting bagi masyarakat dan mendukung arah pengembangan perumahan, serta mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terjangkau dan layak huni.

"Raperda RP3KP ini diharapkan menjadi perda induk, karena berlaku tahun 2020 - 2040. Untuk itu kajian teoritis dan praktik empiris, serta landasan filosofis sosiologis dan yuridisnya harus benar-benar baik dan kuat, sesuai dengan kondisi Kabupaten Kepahiang," ujar Hendri. (sly)



TERPILIH: Pasangan Duta Pilkada Kepahiang 2020 yang bertugas membantu KPU Kepahiang melakukan sosialisasi tahapan Pilkada guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Singkirkan 18 Kandidat

Rahmat dan Erwina Jadi Duta Pilkada

KEPAHIANG - Rahmat Novian Saputra dan Erwina Rahayu dinobatkan sebagai Duta Pilkada Kepahiang 2020. Keduanya terpilih setelah menyingkirkan 18 kandidat lainnya dalam Festival Pilkada Damai yang digelar KPU Kepahiang. Kedepan tugas pasangan Duta Pilkada ini sebagai mitra KPU Kepahiang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya para generasi muda dan pemilih pemula guna meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada yang digelar 9 Desember mendatang.

"Kita berharap Duta Pilkada yang telah terpilih ini bisa membantu KPU Kepahiang dalam melakukan sosialisasi Pilkada. Sehingga target partisipasi pemilih di angka 85 persen bisa tercapai," kata Ketua KPU Kepahiang Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.

Kenapa Duta Pilkada ini hanya difokuskan untuk menasar para generasi muda dan pemilih pemula? Mirzan menjelaskan bahwa pemilih inilah yang masih belum banyak mengetahui manfaat dari partisipasi dalam pesta demokrasi. Bahkan dari beberapa kasus pemilu yang pernah diselenggarakan, para pemilih muda atau pemilih pemula sangat berpotensi golput lantaran minimnya pengetahuan tentang manfaat Pemilu.

"Pemilih pemula kita dan pemilih muda di Kabupaten Kepahiang saat ini diperkirakan mencapai 500 orang. Untuk merangkul mereka,

kita membutuhkan para pemuda dalam melakukan sosialisasi. Tugas ini tidak hanya diemban oleh pasangan Duta Pilkada yang menang ini saja, namun seluruh duta pilkada yang telah masuk dalam tahapan seleksi. Baik runner up maupun kategori lainnya," beber Mirzan.

Diketahui pada Pemilu 2019 lalu, dari jumlah DPT 108.405 pemilih ditambah jumlah DPTb 178 pemilih dan DPK 5.447 pemilih, total pemilih di Kabupaten Kepahiang mencapai 114.030 jiwa. Dari jumlah tersebut, untuk Pilpres angka partisipasi pemilih mencapai 92.847 pemilih atau 81,4 persen. Sementara untuk pemilihan DPR RI jumlah pemilih sebanyak 92.753 atau 81,3 persen, DPD RI sebanyak 92.754 pemilih atau 81,3 persen, DPRD Provinsi sebanyak 92.736 atau 81,3 persen, dan DPRD Kabupaten 92.753 pemilih atau 81,3 persen.

Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, dimana jumlah pemilih di kabupaten Kepahiang dari jumlah kolektif DPT, DPTb, DPPH, dan DPTb2 adalah sebanyak 110.470 pemilih. Yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 75.028 pemilih atau sebanyak 67,9 persen.

Angka tersebut justru menurun pada Pilgub 2015. Dari jumlah pemilih kolektif sebanyak 112.335 orang, yang menyalurkan hak pilihnya adalah 75.462 atau sekitar 67,1 persen. Hal serupa terjadi pada Pilbup 2015 lalu dimana jumlah pemilih 75.446 orang atau 67,1 persen. (sly)

DIKONTRAK RUMAH



Type 90 Lantai Granit Marmer
Air Sumur Boor, Kamar Mandi di Kamar Utama, Plafond Gipsun Minimalis, Carport, Plafon Gipsun Lokasi Strategis di Kota Bengkulu
Jl. Sungai Rupat 1 Pagar Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu
Hubungi Telp/WA 0823 7172 8128, 0822 7980 5330

JUAL TANAH/RUMAH

Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas :
3 Km Tidur, 1 R. Tamu, 1 R. Tv/Keluarga, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

DIJUAL/ DIKONTRAKAN RUKO



Ruko 4 Pintu, (2 Lantai + Basement) Ukuran 4 x 16, Sumur Gali, Listrik, 1.300 per pintu, Bangunan Kokoh
Jl. WR Supratman (Jl Rya Benteng) Hubungi Telp/WA
0823 7172 8128,
0822 7980 5330

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

MENGIMBAU KEPADA MASYARAKAT

Untuk Mewaspada Ancaman Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, Pohon Tumbang, dan Puting Beliung)

Serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan dengan Melakukan 3M+1 Dalam Masa Pandemi Covid-19



Pit Bupati Netti Herawati, S.Sos



Kepala BPBD ex. Officio Zamzami Zubir, SE, MM



Kepala Pelaksana BPBD Ir. Taufik

Call Center BPBD Kepahiang : 0812 7878 5566

Siapa Tanggah, Siapa Menanggulangi

TELEPON PENTING

Call Center Polsek Karang Tinggi :

Perwira PengHubung :	081278617339
RSUD Benteng :	081368965552
Pos A Nakau :	085279125960
Pos B Meringgi Sakti :	085279125930



SANKSI: Para pelajar dikenakan sanksi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan teks Pancasila.

Sudah Ratusan Warga Terjaring Razia Prokes

BENTENG - Tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 masih terbilang rendah. Hal ini terbukti, sudah 259 orang terjaring razia yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Benteng yang terdiri dari Satpol PP, OPD terkait, TNI/Polri. Tujuh diantaranya dikenakan denda administrasi Rp 100 ribu.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R melalui Sekretaris Satpol PP Benteng, A Pompy, S.Sos menjelaskan, hingga saat ini tim Satgas sudah melaksanakan razia di enam titik berbeda di Kabupaten Benteng. Dari enam lokasi tersebut, total keseluruhan yang melanggar prokes berjumlah 259 orang. Dengan masih banyaknya warga yang tidak menerapkan prokes, membuktikan jika kesadaran warga memang masih sangat rendah.

Enam lokasi razia yang sudah dilaksanakan yakni depan kompleks perkantoran Nakau terjaring sebanyak 28 orang, Kelurahan Taba Penanjung terjaring sebanyak 59 orang, Desa Ujung Karang terjaring sebanyak 42 orang, Desa Karang Tinggi terjaring 51 orang, Desa Kancing depan Polres Benteng terjaring 30 orang dan wilayah Desa Taba Lagan terjaring 49 orang.

Dijelaskannya, tujuh orang yang dikenakan denda administrasi Rp 100 ribu karena mereka menolak melaksanakan sanksi kerja sosial sehingga harus membayar denda. "Khusus di wilayah Desa Taba Lagan, ditemukan 10 pelajar yang tidak menggunakan masker. Mereka mendapatkan teguran dari tim Satgas agar tidak mengulangi lagi untuk tidak memakai masker saat keluar rumah. Para pelajar ini dikenakan sanksi harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan teks Pancasila tanpa melihat teks," terang Pompy.

Ia menambahkan melihat masih banyaknya warga yang tidak sadar untuk menerapkan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan ini, ke depan tim Satgas akan terus gencar dan secara rutin setiap hari melaksanakan razia di titik-titik keramaian warga.

"Kita sudah membuat jadwal melaksanakan razia secara rutin setiap harinya. Ini semua untuk meminta warga taat dan patuh untuk mematuhi prokes. Apabila masih ditemukan warga yang tidak mematuhi prokes, maka sanksi tegas sudah siap kita berikan," tutup Pompy. (jee)

2021, Pendopo Mulai Dibangun

BENTENG - Dinas Pekerjaan Umum dan Pencanaan Ruang (PUPR) Benteng memastikan pembangunan pendopo yang berada di dekat rumah dinas (rumdin) Bupati akan dimulai tahun 2021. Untuk diketahui pembangunan pendopo ini awalnya ditargetkan akan dibangun pada tahun 2020 ini, namun ditunda dikarenakan Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR, Harmen Junaidi mengatakan, anggaran pembangunan pendopo untuk tahun 2020 dipangkas untuk Covid-19 sehingga pembangunan dihentikan sementara atau ditunda. "Untuk pembangunan pendopo ini mengenai kontrak dengan pihak ketiga sudah dilaksanakan tahun 2020 ini. Namun pengerjaannya dilaksanakan tahun 2021. Sehingga untuk tahun depan, kita tidak perlu lagi melaksanakan lelang karena sudah ada kerjasama atau kontrak dengan pihak ketiga," jelasnya.

Dia menambahkan penundaan atau penghentian sementara pembangunan pendopo ini dikarenakan anggaran Rp 1,2 miliar untuk pembangunan pendopo dialihkan semua untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. "Meskipun pembangunan pendopo ini dikerjakan tahun 2021, untuk pembangunan rumdin Bupati hingga saat ini sudah selesai 100 persen dan tinggal dilakukan serah terima. Sehingga dalam waktu dekat bupati sudah bisa menempati rumdin," bebernya. (jee)



PENGHARGAAN: Bupati Benteng, Ferry Ramli menerima dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan RI.

42 Desa Masih Tunggu Perbaiki APBDesP

BENTENG - Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hingga kemarin (16/11) dari 142 desa yang ada di Kabupaten Benteng, Dana Desa (DD) yang disalurkan sudah mencapai 100 desa. Sedangkan 42 desa lagi hingga saat ini memang belum disalurkan.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas PMD Benteng, Nenny Zarniawati SH, MH, desa yang sudah menyerahkan berkas APBDesP ke Dinas PMD sudah mencapai 122 desa. Akan tetapi untuk desa yang sudah disalurkan DD hanya 100 desa.

"Hal ini dikarenakan 22 desa

lagi masih ada perbaikan dan kelengkapan berkas yang harus diselesaikan, baru nanti akan segera disalurkan DD nya. Kemudian untuk berkas APBDesP 20 desa lagi, hingga saat ini belum diserahkan kepada kita, karena masih dalam tahap verifikasi di tingkat kecamatan," ungkapnya.

Nenny berharap pemerintah desa cepat menyerahkan berkasnya ke kecamatan agar bisa diperiksa. Pihak kecamatan juga diharapkan apabila berkas APBDesP sudah diserahkan agar langsung diverifikasi.

"Apabila belum diserahkan, proses pencairan DD belum bisa dilakukan dan akan menghambat semua program di set-

iap pemerintah desa. Baik itu menghambat pekerjaan fisik yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dan menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahap keempat, kelima dan keenam kepada setiap penerima," jelasnya.

Untuk diketahui kalau saat ini penyaluran BLT DD sudah harus disalurkan oleh setiap desa. Selain itu, saat ini baru 99 desa yang telah menyelesaikan penyaluran BLT DD tahap keempat. Padahal pada bulan November ini sudah masuk dalam penyaluran BLT DD tahap kelima. (jee)



BERKAS: Para staf BKPSDM sedang memeriksa berkas unggahan CPNS.

1 Januari, Terima Gaji Pertama

BENTENG - Terhitung Masa Tugas (TMT) 129 CPNS Bengkulu Tengah (Benteng) yang lulus tahun ini, 1 Desember 2020. 1 Januari 2021, para CPNS akan menerima gaji pertama.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Benteng, Apilesipi, S.Kom, M.Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Promosi, M Ario Nurvansyah, SH mengatakan saat ini semua peserta sudah menyelesaikan persyaratan pemberkasan. Baik itu pemberkasan melalui website maupun penyerahan berkas

fisik ke Pansel BKPSDM.

"Sehingga hingga saat ini, kita tinggal menunggu verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). Setelah penetapan NIP, maka akan ditetapkan TMT pada 1 Desember mendatang," ungkapnya.

Ario menambahkan setelah ditetapkan TMT pada 1 Desember 2020, maka CPNS Benteng sudah bisa menerima gaji pertama pada 1 Januari 2021. Ia memastikan seluruh CPNS yang lulus sudah melakukan pemberkasan, tidak ada yang mengundurkan diri.

"Pada penerimaan CPNS Benteng formasi 2019 ini, ada tiga formasi yang tidak terisi, seperti dokter spesialis anak, dokter spesialis kebidanan dan dokter spesialis penyakit dalam. Kekosongan ini dikarenakan tidak ada peserta yang mendaftarkan diri di tiga formasi tersebut," bebernya.

Menurut Ario, BKN akan memverifikasi semua berkas CPNS. Apabila peserta terbukti memberikan data palsu, manipulasi data atau tidak sesuai dengan fakta, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan akan diberhentikan dari CPNS. (jee)

Berprestasi, Terima 2 Penghargaan Sekaligus

BENTENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) menerima dua penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Bengkulu, kemarin (16/11). Dua penghargaan ini diterima setelah Pemkab Benteng meraih terbaik ketiga dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang dinilai bagus.

Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, Weldo Kurniyanto, SE, MM menjelaskan, penghargaan diterima Pemkab Benteng ini berupa piagam penghargaan untuk LKPD, karena Benteng diketahui telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Selanjutnya kita mendapatkan penghargaan terbaik ketiga dalam penyaluran DAK fisik. Khusus untuk DAK fisik terdapat beberapa kriteria penilaian sehingga kita mendapatkan penghargaan ini, diantaranya jumlah yang disalurkan tidak tersisa pada Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD), kecepatan dalam penyerapan maupun penyaluran hingga capaian atau output dari DAK fisik itu sendiri," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk DAK pada tahun 2020, Pemkab Benteng mendapat DAK fisik mencapai Rp 64 miliar, kemudian untuk yang sudah ditransfer ke RKUD sudah mencapai Rp 62 miliar. Sehingga saat ini yang sudah terserap sudah mencapai Rp 40 miliar untuk beberapa OPD yang berbeda. Sementara dari total DAK yang harus diterima pada tahun ini ada Rp 22 miliar lagi yang belum ditransferkan ke RKUD.

"Masih ada sisa Rp 22 miliar, jumlah tersebut yang akan dikejar untuk penyerapan hingga akhir tahun ini. Sehingga kita dapat mempertahankan penghargaan yang sudah kita capai saat ini," terang Weldo.

Lanjutnya, dalam mempertahankan penghargaan yang sudah diterima, anggaran DAK yang masih tersisa dan masih belum diserap akan dikejar untuk salurkan sampai tuntas hingga akhir tahun 2020. "Kita akan berusaha dalam menyalurkan semua anggaran DAK yang belum tersalurkan hingga akhir tahun ini untuk bisa mendapatkan penghargaan pada tahun 2021," tutup Weldo. (jee)

Belum Sepakati Nilai Ganti Rugi Lahan

BENTENG - Ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuklinggau, saat ini sudah memasuki desa terakhir yaitu Desa Sukarumi. Dari 77 lahan yang nilai ganti rugi lahannya sudah keluar, diketahui 73 Warga Terdampak Pembangunan Tol (WTP) sebagai pemilik lahan belum menyetujui nilai ganti rugi lahan yang ditetapkan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Hal ini diungkapkan Kades Sukarumi, Ashardi. Ia menjelaskan nilai ganti rugi lahan sudah keluar. Akan tetapi 73 warga belum menyetujui nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP.

"Warga belum menyetujui nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP ini karena warga kita menilai nilai ganti rugi yang ditetapkan KJPP ini karena warga kita menilai nilai ganti rugi yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan

nilai ganti rugi desa lain. Warga kita merasa dirugikan," jelasnya.

Ashardi menambahkan mengenai belum setujuannya nilai ganti rugi ini, warganya meminta adanya peninjauan ulang yang dilakukan oleh KJPP maupun Kantor Pertanahan Benteng. "Kita meminta peninjauan ulang atas keberatan warga terhadap nilai ganti rugi tersebut. Warga juga meminta dilibatkan dalam melakukan peninjauan ulang nantinya," ungkapnya.

Untuk diketahui bidang tanah yang terdampak pembangunan tol di Desa Sukarumi ini sebanyak 113 bidang tanah. Namun nilai ganti rugi yang baru dikeluarkan hanya 77 bidang tanah, dan sisanya milik 73 warga belum dilakukan penilaian sehingga belum dikeluarkan nilai ganti ruginya. (jee)

INFO HOTEL		
HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX / HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	Jl. Bakti Husada No. 88 Kel. Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	Jl. Raya Jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

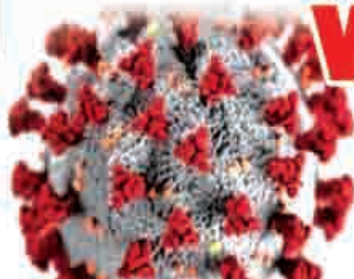
JUAL TANAH
Luas Tanah keseluruhan
323 m² (13 x 24,8), SHM.
Harga Rp. 1,5 jt permeter, NEGO
Lokasi: Jl. Barito bersebelahan dengan perumahan Barito, Padang Harapan Kota Bengkulu.
Minat Hubungi: Hp 08126625522

JUAL RUMAH
Ukuran Tanah 10 x 20 m

Fasilitas:
3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
2 Wastuin
Harga Nego, Sertifikat Hak Milik
Listrik 900 watt, Ventilasi Listrik Pulsa
Alamat: Jl. Flamboyan 1 Gang Vinsu 5 Rt. 11 Rvd.04 Skip, Kel. Kebun Kemanga Kec. Ratus Agung Kota Bengkulu.
Hubungi: Melly, Hp. 08237227217

KURSUS MENGEMUDI MOBIL
LKP BAROKAH

ALAMAT UNIB DEPAN
PROMO AKHIR TAHUN
KOTA BENGGKULU
MULAI 800k BISA KURSUS
HP:0813 7384 0214



DATA PENERBITAN PASPOR JULI - OKTOBER 2020

BULAN	JUMLAH
JULI	219 paspor - 164 paspor baru - 55 paspor penggantian
AGUSTUS	136 paspor - 90 paspor baru - 46 paspor penggantian
SEPTEMBER	172 paspor - 133 paspor baru - 39 paspor penggantian
OKTOBER	233 paspor - 172 paspor baru - 61 paspor penggantian

Pembuatan Paspor Terapkan Prokes Ketat

BENGKULU - Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 dengan ketat sejak adanya wabah pandemi Covid-19. Mulai dari pengecekan suhu badan, menyediakan fasilitas mencuci tangan, penyemprot disinfektan, serta mewajibkan pengunjung menggunakan masker.

Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Bengkulu, Samsu Rizal mengatakan sejak dibuka kembali pelayanan di Kantor Imigrasi, penerapan prokes sudah dilakukan dengan ketat agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upayaantisipasi penyebaran Covid-19. "Paling banyak permohonan penerbitan itu pada Oktober lalu sebanyak 233 paspor," ujar Samsu.

Terdata, sejak Juli hingga Oktober ini, tercatat ratusan paspor telah diterbitkan. Dan, pada Oktober, jumlah permohonan penerbitan paspor mengalami peningkatan bila dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Rinciannya, pada Juli lalu sebanyak 219 paspor, yaitu 164 paspor baru dan 55 paspor penggantian.

Pada bulan Agustus, diterbitkan 136 paspor, yaitu 90 paspor baru, dan 46 paspor penggantian. Lalu bulan September sebanyak 172 paspor terdiri dari 133 paspor baru dan 39 paspor penggantian. Serta Oktober tercatat 233 paspor meliputi 172 paspor baru dan 61 paspor penggantian. "Pelayanan sempat ditutup, tapi ketika dibuka kembali permohonan meningkat," jelasnya.

Samsu menerangkan, ada 2 model layanan yang diberikan untuk penerbitan paspor. Ini juga yang menyebabkan peningkatan permohonan penerbitan. Meliputi, layanan simpatik dari inisiatif Kantor Imigrasi yang berkerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk menjemput bola, dengan mengutamakan daerah yang potensi permohonannya tinggi. "Model kedua, kemudahan yang diberikan terhadap komunitas, maupun perusahaan atau kantor pemerintah. Dengan memberikan surat permohonan ke Kantor Imigrasi, dengan jumlah minimal permohonan itu 50 orang," bebernya.

Ditambahkan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim), Gunawan, untuk pelayanan paspor ketika wabah Covid-19 muncul, sempat dibatasi dan diberlakukan sementara. Sehingga beberapa bulan terakhir, penerbitan paspor hanya diberlakukan untuk kondisi emergency. Kendati demikian, pada Oktober lalu jumlah permohonan penerbitan paspor kembali mengalami peningkatan. (key)

Layanan Rapid Test Masih Dibuka

BENGKULU - Pemeriksaan menggunakan rapid test tetap dilakukan di Labkesda Provinsi Bengkulu. Sampel darah yang diambil akan digunakan untuk mendeteksi imunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Dengan begini, pasien pada tahap awal infeksi dapat diidentifikasi lebih cepat.

Kepala Lakedsa Provinsi Bengkulu, Dr. Med. Hartian Pansori, M.Kes, Part mengatakan, pelayanan rapid test maupun swab dibuka mulai pukul 08.00 - 13.00 WIB. Cara pelaksanaan rapid test sangat mudah dan hasilnya bisa dilihat dalam waktu sekitar 10-15 menit.

Ia juga menjelaskan untuk pengujian swab test/PCR dijalankan dalam tiga tahapan. Yaitu pertama pengambilan sampel, jenis sampel yang dibutuhkan untuk swab test adalah dahak, lendir, atau cairan yang ada di bagian nasofaring (area antara hidung dan tenggorokan, orofaring (area antara mulut dan tenggorokan), serta paru-paru.

Pengambilan sampel ini berlangsung sangat singkat, kurang lebih 15 detik. Metode swab test juga tidak akan menimbulkan rasa sakit kepada pasien. Setelah itu, sampel akan dibawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut.

"Setelah ada hasilnya, baik positif atau negatif akan diinformasikan. Jika positif, tapi tidak ada tanda dan gejala sakit berat maupun sedang, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah," terangnya.

Ia menambahkan untuk pemakaian alat rapid test per hari di Labkesda Provinsi Bengkulu ini mencapai 20 rapid test. "Sedangkan untuk penggunaan swab lebih banyak dan mencapai 30 - 60 pengambilan sampel," bebernya. (hkm)



CEGAH COVID: Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Brimob Polda Bengkulu melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi acara pernikahan.

Cegah Covid, Brimob Semprot Disinfektan

Di Lokasi Acara Pernikahan

BENGKULU - Saat ini warga mulai banyak menggelar acara pernikahan yang tentunya akan memunculkan keramaian atau berkumpulnya banyak orang. Untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lokasi pernikahan, personel dari Unit Kimia, Biologi, dan Radioaktif Sat Brimob Polda Bengkulu melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang menggelar resepsi pernikahan. Diketahui

tim ini tergabung dalam Operasi Aman Nusa II Pencegahan penyebaran Covid-19.

Dansat Brimob Polda Bengkulu, Kombes Pol. Susnadi, S.IK melalui Iptu. Ulil Sofian menjelaskan penyemprotan ini penting dilakukan guna meminimalisir adanya penambahan kluster penyebaran Covid-19. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melangsungkan resepsi pernikahan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

"Setelah kita semprot, kita berikan imbauan agar tuan rumah selaku penanggungjawab acara

resepsi pernikahan wajib mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jumlah tamu undangan. Agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran covid-19," jelasnya.

Dia menuturkan personel Satuan Brimob Polda Bengkulu akan terus berusaha melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu. "Misalnya seperti patroli imbauan dan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat ibadah maupun kantor-kantor pelayanan publik lainnya," kata Susnadi. (zie)

Limbah Medis Capai 200 Kilogram/Hari

BENGKULU - Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat volume limbah medis ikut meningkat. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena limbah medis yang dibuang begitu saja dapat membawa dampak bagi kesehatan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkesda Provinsi Bengkulu, Alfian, SKM, MM mengatakan, limbah medis yang terkait dengan penanganan wabah Covid-19 meliputi masker, sarung tangan, dan tisu. Saat ini, ada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penanganan limbah medis. "Rumah sakit hanya mengumpulkan di tempat, nanti pihak ketiga yang ambil," katanya.

Ia juga mengatakan, limbah medis merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang wajib dikelola. "Pemusnahan limbah infeksius Covid-19 secara tepat dan benar sangat penting, untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran Covid-19," jelasnya.

Menurut Alfian, setiap pasien bisa menyumbang limbah saat wabah. Meski limbah medis tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pasien, tapi juga dari tenaga medis yang menangani pasien. Dalam sehari limbah medis ini mencapai 200 kilogram. "Angka itu gamba-



LIMBAH: Petugas kebersihan saat mengangkat limbah medis ke mobil pembuangan limbah.

ran kasar potensi limbah medis selama wabah Covid-19," bebernya.

Ia menegaskan petugas yang menangani limbah medis harus dilengkapi alat pelindung diri. (hkm)

Elva Hartati Salurkan Bantuan Ventilator

BENGKULU - Anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Hj. Elva Hartati Murman, SIP, MM memberikan bantuan sejumlah ventilator kepada seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu. Ventilator merupakan alat bantu pernapasan yang menjadi salah satu komponen vital di rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19.

"Penyaluran bantuan ventilator dari kami dilakukan dalam sejumlah tahap. Akan kami bagikan kepada seluruh rumah sakit yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu," jelas Elva.

Ia juga mengatakan, ventilator ini disalurkan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat untuk mempercepat penanganan pasien Covid-19. "Ini sangat diperlukan di kondisi saat ini, mengingat kebu-



BANTU: Anggota DPR RI, Elva Hartati menyalurkan bantuan ventilator ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

tuhannya masih sangat vital dalam membantu merawat pasien Covid-19," katanya.

Ia menilai rumah sakit harus menjadi garda terdepan untuk mengurangi angka kematian dengan

ditingkatkannya layanan dan meningkatkan angka kesembuhan.

"Kita ingin wujudkan bagaimana maksimal kualitas layanan di rumah sakit. Kita tingkatkan semangat dan harapan sembuh dari pasien Covid-19. Peralatan ventilator ini penting sebagai penanganan pasien yang sudah masuk fase gagal nafas akut," tegas Elva.

Elva juga berharap kepada masyarakat luas untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dimana pun berada. Hal ini dilakukan agar penularannya tidak semakin bertambah. Ia juga berharap dukungan pihak swasta dan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mengendalikan pandemi dan penanganan pasien yang sudah terpapar Covid-19. (hkm)